

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK
PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA
SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
726/PID.SUS/2023/PN PLG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

Devita Alfiyatus Sa'adah

NIM: 2002026059

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50135
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://sh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Devita Alfiyana Sa'adah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya menceliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
kirimkan naskah skripsi Saudara dibawah ini :

Nama : Devita Alfiyana Sa'adah

NIM : 2002026059

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi
Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial
(Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Pilg)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-
wawancara-kan. Atas perhatiamnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 September 2024
Pembimbing

Drs. H. Mohammad Seikh MA.
NIP: 196603181993031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp.(024)7601291, Fax simili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Devita Aiflyatus Sa'adah
NIM : 2002026039
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Jadul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Pgl)**

Telah diujikan dalam sidang manasikah oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 September 2024. Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 29 September 2024

Ketua Sidang /Pengaji

Dr. Ahmad Alfiy Roffiuddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang /Pengaji

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Pengaji Utama I

NIP. 197508152008011017

Pengaji Utama II

NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP.196603181993031004

MOTTO

اللقاء أو بالمصحف أو منه بشيء أو بالقرآن استخف من أن على وأجمعوا
أثبته ما نفي أو خبر أو حكم من به جاء مما بشيء كذب أو قاذورة في
كفر به عالم وهو ذلك من شيء في شك أو نفاه ما أثبت أو

“Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menghina Alquran atau sesuatu dari Alquran, atau mushaf, atau melemparkannya ke tempat kotoran, atau mendustakan sesuatu yang datang dari Alquran, baik itu berupa hukum atau informasi, atau menafikan sesuatu yang telah ditetapkan Alquran, atau menetapkan sesuatu yang telah dinafikan Alquran, atau meragukan sesuatu dari hal tersebut, sedang dia mengetahuinya, maka ia telah kafir

(Yahya bin Syaraf al-Nawawi, t.th: 196).¹

¹ Yahya bin Syaraf Al Nawawi. al-Majmu Syarh al-Muhaddzab. Jeddah: Maktabah alIrsyad, t.th.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai wujud rasa terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis

Kedua orang tua penulis Bapak H. Abdul Khandik dan Almh. Ibu Hj. Sutami, serta kedua kakak penulis Mukhlisin S.Pd dan Alfiyatur Rahmah S.pd, yang selalu memberikan kasih sayang dan senantiasa mendoakan, memberi dukungan, mengajarkan bagaimana caranya bertanggung jawab atas diri sendiri, serta mengajarkan arti kehidupan kepada penulis.

Guru dan Dosen Penulis

Seluruh Guru dan Dosen yang telah mendidik penulis mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis.

Teman dan Sahabat Penulis

Para teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis.

Almamater Penulis

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devita Alfiyatus Sa'adah
NIM : 2002026059
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Pg)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi sampaikan pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 17 September 2024

Devita Alfiyatus Sa'adah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	Bb	-
ت	<i>Tā'</i>	Tt	-
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	<i>Jīm</i>	Jj	-
ح	<i>hā'</i>	Hh	h dengan satu titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Khkh	-
د	<i>Dāl</i>	Dd	-
ذ	<i>Ẓāl</i>	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	<i>rā'</i>	Rr	-
ز	<i>Zāl</i>	Zz	-

س	<i>Sīn</i>	Ss	-
ش	<i>Syīn</i>	Ssy	-
ص	<i>Sād</i>	Sṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	<i>ḍād</i>	Dḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	<i>tā'</i>	Tṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	<i>zā'</i>	Zz	z dengan satu titik di bawah
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	Gg	-
ف	<i>fā'</i>	Ff	-
ق	<i>Qāf</i>	Qq	-
ك	<i>Kāf</i>	Kk	-
ل	<i>Lām</i>	Ll	-
م	<i>Mīm</i>	Mm	-
ن	<i>Nūn</i>	Nn	-
ه	<i>hā'</i>	Hh	-

و	<i>Wāwu</i>	Ww	-
ء	<i>Hamzah</i>	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	<i>yā'</i>	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدْدُ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرُبُ ditulis *yadribu*

سُعِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah + yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كيْفَ

- b. *Fathah + wāwu* mati ditulis *au* (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūtah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةٌ ditulis *talhah*

التَّوْبَةٌ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةٌ ditulis *Fātimah*

2. *Tā marbūtah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis *raudah al-atfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis *raudatul atfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: **الملِكُ** ditulis *al-maliku*

الكافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

القَلْمَنْ ditulis *al-qalamu*

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: **حَيْرُ الرَّازِقِينَ** ditulis *khair* *al-rāzīqīn* atau *khairurrāzīqīn*.

ABSTRAK

Kasus penodaan agama di Indonesia melalui media sosial semakin menjadi sorotan publik dan penegak hukum. Salah satu contohnya adalah putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg tentang *content creator* Lina Mukherjee, yang mengunggah video makan babi kriuk sembari mengucapkan lafadz "bismillah" yang disebarluaskan di TikTok dan YouTube. Konten tersebut dianggap menyinggung umat Islam dan berpotensi menimbulkan kebencian antar kelompok berdasarkan SARA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan akhir yang dijatuhi sanksi 2 tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terhadap pelaku penodaan agama hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini termasuk yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penerapan norma hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan sumber dari buku, jurnal, dan literatur hukum. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis dan penelaahan permasalahan hukum untuk menyelesaikan isu yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Pelanggaran terhadap Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Sedangkan majlis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan kurungan dikarenakan menimbang penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa untuk pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya. Dalam hukum pidana Islam, tindakannya termasuk jarimah ta'zir, yang memberi hakim kebebasan untuk memutuskan berdasarkan kondisi saat ini.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penodaan Agama, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

The case of religious defamation in Indonesia through social media is increasingly attracting public and law enforcement attention. 726/Pid.Sus/2023/PN Plg regarding content creator Lina Mukherjee, who uploaded a video of herself eating crispy pork while saying the phrase "bismillah," which was shared on TikTok and YouTube. The content is considered offensive to Muslims and has the potential to incite hatred among groups based on ethnicity, religion, and race. This research aims to analyze the final decision imposing a 2-year prison sentence and a fine of IDR 250,000,000 (two hundred fifty million rupiah) against the perpetrator of religious defamation under positive law and Islamic criminal law.

This research is normative juridical, which focuses on the application of positive legal norms. The method used is library research, with sources from books, journals, and legal literature. The approach taken is a case approach, which focuses on analyzing and examining legal problems to resolve existing issues.

The research results indicate that, as alleged in the single indictment. Violations of Article 45A paragraph (2) in conjunction with Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 can be punished with a maximum prison sentence of 6 years and/or a maximum fine of IDR 1 billion. Meanwhile, the panel of judges sentenced the defendant to 2 (two) years in prison and a fine of IDR 250,000,000 (two hundred fifty million rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with 3 months of confinement, considering that this sentence is intended for the defendant's learning so that the defendant realizes their mistake. In Islamic criminal law, the action falls under ta'zir offenses, which gives the judge the discretion to decide based on the current circumstances.

Keywords: Blasphemy, Criminal Sanctions, Islamic Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala puji serta rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-menerang, yang selalu kita nantikan syafa'atnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Arifana Nur Kholid, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Drs. H. Mohammad Solek, M.A., selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta fikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh Pegawai Perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

9. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag., dan Prof. Umi Hj. Arikhah, M.Ag., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang beserta segenap Asatidz dan Asatidzah.
10. Bapak H. Abdul Khandik dan Almh. Ibu Hj. Sutami selaku kedua orang tua penulis yang telah merawat penulis dari kecil hingga saat ini dan senantiasa memberikan doa untuk penulisi, serta memberikan dukungan moral maupun materiil untuk penulisi. Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis khususnya kepada Ibu tercinta yang telah wafat pada Tanggal 19 Oktober 2023.
11. Mukhlisin, S.Pd., dan Alfiyatur Rahmah, S.Pd., selaku kedua kakak penulis yang telah memberikan semangat serta selalu mendukung dan memberikan nasihat-nasihat untuk menjalani kehidupan di dunia ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang Angkatan 2020 (Khususnya Itsna Nabilatuzzahra) yang sudah membersamai penulis dalam suka maupun duka selama tinggal di Semarang.
13. Segenap teman kamar 2.7 (Bibah, Alfi, Niken, Firda, Saras, Karisa) yang sudah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama proses mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Segenap Keluarga Besar Program Studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2020 Khususnya Kelas HPI B (Syifa, Finda, Lisa, Intan, Zahra) yang sudah menjadi teman dekat penulis selama di bangku perkuliahan.
15. Segenap sahabat CakCik (Nabila, Mila, Ais, April, Faizah, Nanda, Salwa, Fina, Hikma, Untsa, Ama) yang bersedia menjadi tempat bercerita penulis dari jenjang SMA hingga saat ini.

16. Ilham Sedayu selaku teman laki-laki penulis yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan menemani penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.
17. Serta seluruh pihak-pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi salah satu proses pendewasaan diri bagi penulis.

Semarang, 16 September 2024



Devita Alfiyatus Sa'adah
2002026059

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Maanfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II PENODAAN AGAMA DAN <i>JARIMAH RIDDAH</i>	17
A. Penodaan Agama	17
B. <i>Jarimah Riddah</i>	32
BAB III PUTUSAN TENTANG PENODAAN AGAMA Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg	47

A. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg	47
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg).....	54
A. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Menurut Pertimbangan Hukum Hakim	54
B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam.....	62
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
C. Penutup.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan kita dalam mendapatkan informasi apa saja yang ingin kita ketahui, terlebih lagi dalam menggunakan media sosial masyarakat dapat lebih mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Media sosial selain dapat digunakan untuk hal-hal yang positif juga dapat digunakan untuk hal-hal yang negatif salah satunya adalah penodaan terhadap agama melalui media sosial. Banyak terjadi penodaan agama melalui media sosial seperti yang terjadi di berbagai negara khususnya di negara Indonesia. Permasalahan mengenai penodaan agama ini semakin mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional. Agama di Indonesia merupakan hal utama yang ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena mengandung nilai kesusilaan, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama adalah menjadi pemersatu dari keaneka ragamannya.¹

Negara Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Undang-Undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan telah mengatur tentang perbuatan hukum terkait *cyber crime* atau kejahatan yang terjadi di dunia maya. Dalam pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa penodaan agama dapat diminta pertanggungjawabannya apabila telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yakni “barang siapa yang

¹ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), h. 41.

telah memberikan informasi yang menimbulkan rasa benci dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)".²

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, maka berkembang pula jenis temuan kasus-kasus baru dalam penodaan agama. Media sosial seharusnya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan, memperluas jaringan pengetahuan dan interaksi antar sesama penggunanya jika digunakan dengan baik dan benar.³ Akan tetapi, akhir-akhir ini kasus kejahatan atau pelanggaran pidana yang berasal dari media sosial sering ditemukan, seperti melalui Tiktok, Youtube, Instagram, dan media sosial lainnya.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan penodaan agama islam di Indonesia yang menjadi perhatian publik yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kasus seorang publik figur Lina Lutfiawati alias Lilu alias Lina Mukherjee yang melakukan penodaan agama melalui konten video makan babi kriuk dan mengawalinya dengan lafadz "bismillah" yang disebarluaskan melalui aplikasi Tiktok yang terpasang dengan akun atas nama "@lilumukherji" dan aplikasi Youtube yang terpasang dengan akun atas nama "@lilumukherjee". Dari konten video tersebut dapat melukai perasaan orang-orang yang beragama islam sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁴

² Khairani dkk, *Penistaan Agama Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam: Telaah Kasus Mirza Al-Fath*, Jurnal: Jurista, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, h. 139.

³ Arifianto. S, *Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat* (Jakarta: Media Bangsa, 2013), h.364.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, No Perkara: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Kasus penodaan agama melalui media sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, karena setiap individu dapat dengan mudah mengakses internet dan memiliki akun di media sosial. Fenomena seperti ini yang seharusnya dapat disikapi dengan baik oleh semua pihak, supaya nantinya tidak terulang lagi kasus-kasus tindak pidana penodaan agama melalui media sosial. Kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat (*Freedom of Thought*) yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu faktor munculnya kasus penodaan agama melalui media sosial.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjamin setiap individu warga negaranya dalam hal kebebasan beragama, jaminan konstitusional ini dapat dilihat dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.⁶ Kebijakan tentang jaminan kebebasan beragama juga terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik.⁷

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati dan menghargai haknya

⁵ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 1, h. 97.

⁶ Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan (2).

⁷ Rohidin, *Kontruksi Baru Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), Cet. 1, h. 36.

sendiri. Setiap warga negara yang tidak menaati batasan-batasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukumnya, karena hukum merupakan aturan yang mengundang pertimbangan kesesuaian yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.⁸ Seluruh hukum yang dibuat oleh negara dalam arti yang seluas-luasnya tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan setiap tertib hukum yang dibuat harus didasarkan dan ditujukan untuk merealisir hukum Tuhan.⁹ Oleh karena itu, setiap individu maupun kelompok dilarang untuk melecehkan, menghina, menodai, atau menistakan suatu ajaran agama yang dianut Indonesia.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa kebebasan berfikir, nurani, beragama, dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak asasi yang paling penting. Bahkan hak asasi tersebut mempunyai status sebagai hak yang tidak boleh diderogasi (dikurangi dan dilanggar dalam kondisi apapun). Aturan mengenai hak-hak beragama diatur bukan hanya untuk setiap individu warga negara penganutnya saja, tetapi pemerintah juga telah mengatur persoalan tentang perlindungan untuk agama-agama yang telah diakui keberadaanya dan dianut oleh penduduk Indonesia. Menurut UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) agama yang dipeluk oleh penduduk Indoensia diantaranya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.¹⁰

Kasus-Kasus penodaan agama tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Tetapi sudah terjadi sejak zaman Nabi

⁸ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 36.

⁹ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2000), hlm. 1.

¹⁰ Rohidin, *Kontruksi Baru Kebebasan Beragama*, h. 37.

Muhammad SAW. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang laki-laki buta yang memiliki seorang budak perempuan menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW. Lalu ia menikam seorang budak perempuan itu, kemudian ia menghadap Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kisah tersebut. Lantas Nabi Muhammad SAW berkata: “*Saksikanlah bahwa darah (budak perempuan) itu halal*”.¹¹ Dari jawaban Nabi Muhammad SAW dalam hadits tersebut menunjukan bahwa sikap Nabi sangat tegas dalam menghukum penoda agama.

Dalam al-Qur'an Allah menentang para penghina Nabi Muhammad SAW, para pembenci al-Qur'an, Para penista al-Qur'an untuk membuat sesuatu yang serupa dengannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Hud ayat 13:

اَمْ يَعْقُلُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيٍّ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوَنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ

“Bahkan mereka mengatakan, “(Muhammad) telah membuat-buat al-Qur'an itu”. Katakanlah, “(Kalau demikian), datangkanlah sepuluh surah semisal dengannya (al-Qur'an) yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja diantara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar” (Q.S. Hud ayat 13).¹²

Syari'at islam telah menetapkan norma-norma hukum untuk mengatur kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhan-Nya maupun hubungan sesama manusia.¹³ Namun dalam syari'at islam belum sepenuhnya mengatur secara khusus *jarimah* yang

¹¹ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t), hlm. 477.

¹² Tim Penerjemah, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, 223.

¹³ Muhammad Faruq Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri'I al-Islami*, (Beirut: Dar al-Qolam, 1981), hlm. 11.

berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama. Oleh sebab itu, *jarīmah* yang tidak terdapat atau tidak ada ketetapannya dalam syari'at baik dalam al-Qur'an ataupun Hadits dengan ketentuan yang pasti dan terperinci maka dapat dikenakan dengan *jarīmah ta'zīr*.¹⁴ Hal ini merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama.¹⁵

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 156 dan 156a telah mengatur mengenai masalah penodaan agama.¹⁶ Artinya, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan penodaan terhadap suatu agama tersebut dapat dipidana. Namun, hukum pidana positif (KUHP) tampaknya belum mampu mengantisipasi terhadap pelaku penodaan agama dalam memberikan efek jera. Sehingga masih ditemukan banyaknya kasus-kasus penodaan agama walaupun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama.

Delik agama dalam hukum pidana di Indonesia adalah suatu penyelidikan tentang bagaimana sebab-sebab latar belakang peristiwa, serta adakah unsur pidana yang terkandung di dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam kemungkinan-kemungkinan terciptanya delik agama di dalamnya.¹⁷

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 11. Lihat juga Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah: Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Syariah Press, 2008), hlm. 158.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.

¹⁶ Lihat UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dan lihat juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan 156a.

¹⁷ Juhaya S. Praja, dkk, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1982), h. 10.

Hukum positif dan hukum islam memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu untuk menjaga kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup bagi seluruh masyarakatnya.¹⁸ Dalam islam, penodaan terhadap agama dianggap sama halnya dengan penghinaan terhadap agama. Penghinaan itu meliputi penghinaan terhadap sumber hukum islam baik terhadap al-Qur'an maupun hadits, dan berpaling atau tidak mempercayai dari ketentuan yang ada pada keduanya. Perbuatan ini bagi seorang muslim merupakan bagian dari perilaku yang mendekatkan diri kepada perbuatan murtad.

Menurut al-Asymawi menyatakan bahwa belum ada kepastian bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan hukuman bagi orang yang murtad kepada seorangpun. Bahkan dalam konsep kebebasan beragama, islam sudah jelas mengaturnya. Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْعَيْنِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهُ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 256).¹⁹

Secara spesifik, dalam hukum islam terdapat kajian mengenai aturan dan hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana penodaan agama, kemudian untuk

¹⁸ A. Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 1, h. 15.

¹⁹ Tim Penerjemah, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, 42.

mengurainya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dan unsur-unsur perbuatan tersebut. Tindak pidana (*jarīmah*) menurut hukum pidana islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zīr*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih dalam mengenai tindak pidana penodaan agama melalui media sosial, untuk diangkat sebagai sebuah skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut pertimbangan hukum hakim?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut pertimbangan hukum hakim.
2. Mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut Hukum Pidana Islam.

D. Maanfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai pengembangan pemikiran hukum, penelitian hukum, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum untuk memperkuat landasan hukum yang adil bagi masyarakat dan institusi.
2. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai penerapan hukum untuk menyelesaikan konflik, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Tinjauan pustaka memiliki manfaat dalam memberikan hasil kepustakaan yang relevan dan valid serta membahas topik atau permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diajukan. Adapun tinjauan pustaka ditunjukkan untuk mengetahui secara fokus dari pembahasan yang diteliti oleh penulis. Selain itu, tinjauan pustaka dapat digunakan sebagai bahan pembanding peneliti maupun bahan referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan untuk menunjang penelitiannya. Adapun referensi yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki ketersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Nopa Wahyudi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2020. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-

- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)".²⁰ Skripsi ini membahas dan menganalisis apakah Pengadilan Negeri Jambi telah sesuai dengan UU ITE dan KUHP terkait putusan pidana yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jambi. Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam perseptif Hukum Pidana Islam.
2. Muhammad Amin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016. Skripsi ini berjudul "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787K/Pid/2012".²¹ Skripsi ini membahas tindak pidana penodaan agama perspektif hukum Pidana Positif secara khusus dalam putusan hakim No. 1787K/Pid/2012 terhadap konflik keberagamaan di Sampang, Madura. Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial dalam perseptif Hukum Pidana Islam.
 3. M. Andri Fauzan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2013. Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".²² Skripsi ini membahas tindak pidana penodaan agama melalui jejaring sosial perspektif

²⁰ Nopa Wahyudi, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)". (2020)

²¹ Mohammad Amin, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan No. 1787K/Pid/2012", (2016)

²² M. Andri Fauzan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". (2013)

Hukum Pidana Positif secara sempit yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial secara luas dalam persepektif Hukum Pidana Islam.

4. Kurnia Dewi Anggraeny, jurnal berjudul “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum”.²³ Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penodaan agama secara gramatikal yaitu menghinakan dan merendahkan (derajat dan sebagainya). Pada KUHP terdapat delik yang dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156 Pada Kasus Tindak Pidana Penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan putusan perkara No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Hakim memutuskan bahwa Ahok terbukti melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP. Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial secara luas dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
5. Diah Gustiniati Maulani, jurnal berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”.²⁴ Dengan hasil bahwa pelaku tindak pidana penodaan agama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana jika memenuhi syarat, kemudian

²³ Kurnia Dewi Anggraeny, “*Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum*”. (2017)

²⁴ Diah Gustiniati Maulani, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*”. (2013)

pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana yang dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu pertama secara fungsional bekerjanya atau berprosesnya, kedua secara keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan). Tetapi dalam penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial secara luas dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan pedoman atau cara seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang di pahami.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab problem dan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁶ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber referensinya dari buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan literatur yang relevan sebagai objek

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: (Universitas Indonesia Press. 1986), h. 67

²⁶ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

penelitian.²⁷ Telaah yang digunakan untuk menguraikan objek penelitian pada dasarnya didasarkan pada observasi kritis dan rinci terhadap problematika hukum yang terjadi sekarang ini.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, dan menelaah yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu dapat diambil.²⁸ Untuk mengatasi masalah hukum dan memberikan rekomendasi yang tepat, maka diperlukan sumber-sumber data. Sumber data penelitian yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literature atau analisis terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan dengan masalah atau topic penelitian, khususnya dalam konteks bahan hukum.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis.³⁰ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu

²⁷ Soerono Soekanto, Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 13

²⁸ Sharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rinek Cipta, 1993), 120.

²⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 156.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2007, 52

terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan 156a, UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penodaan Agama, UU ITE Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan tentang bahan-bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu buku, karya ilmiah berupa tesis, jurnal, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian dan membahas mengenai kebijakan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisa, serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum, kemudian menganalisis pendapat para pakar hukum pidana dan pendapat para ulama yang terdapat pada buku-buku dan internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana dalam proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian mengorganisasikan data, kemudian memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat dijadikan kesimpulan sebagai temuan dari penelitian. Hal ini diharapkan

dapat mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian ini dan mengambil data terkait dengan permasalahan yang diteliti secara konkret.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab nya menitik beratkan pada aspek yang berbeda namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini yaitu:

Bab I pendahuluan, yang berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya, yang terdiri dari penodaan agama dan *jarīmah* riddah.

Bab III membahas perihal gambaran umum yang akan memberikan pemaparan mengenai objek penelitian yang akan diamati yaitu tinjauan perkara Putusan tentang penodaan agama Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg) yang terdiri dari profil Pengadilan Negeri Palembang dan Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Bab IV memaparkan hasil dari analisis penelitian yang merupakan sebuah pokok pembahasan dalam skripsi, yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial menurut Hukum Pidana Islam.

Bab V penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merangkum temuan utama dari penelitian dan implikasinya. Sedangkan saran yang menyajikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya atau tindakan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

PENODAAN AGAMA DAN *JARIMAH RIDDAH*

A. Penodaan Agama

1. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Hukum Positif

Pengertian penodaan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penodaan berarti menghinakan, merendahkan (derajat dan sebagainya). Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata *smaad* (menista secara lisan) dari bahasa Belanda.¹ Secara umum penodaan agama diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) seperti simbol-simbol agama, pemimpin agama dan kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.² Pada agama Islam, tidak mengatur secara khusus tentang penodaan agama, al-Qur'an menggunakan istilah kemurtadan/ketidakhormatan dan kafir.

Pemuka agama Islam yang tergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia), yaitu Zainal Arifin sebagai Ketua MUI di Kota Surakarta, mengatakan pengertian dari penodaan agama adalah melecehkan, menghina agama Islam, serta merendahkan elemen-elemen agama Islam. Dalam pengertian tersebut dapat ditentukan kriteria penodaan agama Islam, narasumber

¹Sadiq Adhetyo, *Delik Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Indonesia*, <http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada 21 juni 2024.

²Pultonidkk., *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jakarta, ILRC, 2012), 44.

mengatakan bahwa penentuan kriteria terkait penodaan agama khususnya agama Islam yaitu melecehkan, merendahkan serta menghina agama Islam. Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 29 mengatur tentang kebebasan beragama, apabila dikaitkan dengan hukum agama jelas bahwa diperbolehkan memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, antar umat beragama harus saling toleransi dan menghormati agama lain sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika walaupun bermacam-macam suku, bangsa, dan agama namun tetap satu di Indonesia.³

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama) . Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi Keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya. Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-

³Kimdaine Ulima Jayatri, Supanto, *Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penodaan Agama, Recidive* Volume 5 No. 1 Januari - April 2016 hlm. 51.

Undang Nomor 1 PNPS 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.⁴

a. Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat delik yang dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156 KUHP untuk mengatur seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a. Penjelasan umum yang dapat dilihat dari peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi ketentraman setiap orang dalam beragama dari penodaan atau penghinaan agama atau ajaran-ajaran yang tidak memeluk agama.⁵

Bagian ini akan lebih difokuskan pada pasal 156 KUHP yang sering dijadikan rujukan hakim dalam memutus suatu perkara penodaan agama. Isi dari peraturan tersebut dalam Ketertiban Umum Pasal 156 berbunyi :

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”⁶

⁴ AA Syafruddin, BAB II Tinjauan Pustaka, 2012 hlm. 32.

⁵Kurnia Dewi Anggraeny *Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum*, Volume 2, No. 1, Juni 2017hlm. 290.

⁶ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 35.

Pengertian umum dalam pasal 156 KUHP yaitu tiap-tiap bagian dari penduduk Negara Indonesia yang mempunyai perbedaan satu dari beberapa bagian dengan penduduk lain dikarenakan bangsanya (ras), agamanya, tempat aslinya, keturunannya, kebangsaannya atau hukum tata negaranya, melakukan suatu perbuatan yang bersifat permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap perbedaan tersebut dikenakan pidana menurut Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana Pasal tersebut diatas, dikategorikan sebagai delik terhadap agama, bagian dalam pasal ini yang ingin dilindungi yaitu suatu golongan rakyat Indonesia. Sedangkan dalam pasal 156a KUHP menyatakan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- 1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*
- 2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁷

Unsur pertama dari pasal tersebut menyebutkan unsur dengan sengaja, dimaksudkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana penodaan agama menghendaki untuk melakukan tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan sudah mengetahui akibat yang akan

⁷ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 35.

ditimbulkan dari perbuatan tersebut, tindakan tersebut menyebabkan mendorong supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur kedua dari pasal tersebut “di muka umum”, perbuatan yang dilakukan di muka umum (*in het open baar*), berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dilihat lebih dari satu orang dan dimana masyarakat publik dapat mendengar dan membacanya di tempat umum.

Unsur ketiga “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan”. Unsur ini mempunyai dua tindakan yang berbeda dalam hal sifat. Pada unsur mengeluarkan pendapat yaitu perbuatan seseorang yang bentuknya bisa lisan atau tertulis sehingga dapat mewujudkan apa yang dilihat, dirasakan, difikirkan oleh pelaku, sedangkan melakukan perbuatanya itu lebih pada berupa tindakan seperti merobek Kitab suci, membakar rumah ibadah, menginjak kitab suci, dan lain-lain. Unsur yang keempat yaitu “Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”. Dalam unsur ini bersifat permusuhan maksudnya yaitu perbuatan yang dilakukan menimbulkan suatu keadaan yang timbulnya perasaan benci, membenci atau amarah bagi umat beragama yang agamanya diganggu serta dinodai atau perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang memusuhi agamanya. Dalam unsur kelima bersifat penyalah gunaan artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyalah gunakan ajaran-ajaran dari agama untuk tujuan yang tidak sepatutnya dilakukan.

b. Tindak Pidana Penodaan Agama dalam UU ITE

Tindak pidana di media sosial termasuk dalam tindak pidana di bidang teknologi informasi, dikenal pula kejahatan siber atau dunia maya. *Cyber crime* adalah aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan computer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya atau perbuatan melawan hukum yang menggunakan sarana internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Kejahatan di dunia maya tersebut bisa mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang dan dapat menghilangkan harga diri serta martabat seseorang.⁸

Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pasal 28 (2) UU ITE berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).” Pasal 45 ayat (2) berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.”.⁹

⁸ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, *Pengantar Hukum Siber*, Kotabumi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2019, hlm. 7.

⁹ Pasal 28 (e) Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Hukum Positif

a. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP

Penodaan agama secara umum dipahami sebagai perlawanan terhadap hal-hal yang dipuja atau dilarang (tabu), seperti simbol agama, otoritas agama, atau kitab suci agama. Kata-kata atau tulisan-tulisan yang memusuhi keyakinan aliran utama adalah contoh penodaan agama secara umum. Penodaan agama tidak memiliki definisi atau pemahaman yang tepat dalam hukum. Penodaan agama tidak secara eksplisit didefinisikan atau dijelaskan baik dalam Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a KUHP (pasal penodaan agama)¹⁰. Ada beberapa undang-undang yang mengatur penodaan agama yang bisa disebutkan. Penodaan agama dilarang menurut pasal 156a KUHP. Meskipun hakim sering menggunakan pasal ini sebagai acuan dalam kasus penodaan agama, namun pada kenyataannya tidak selau demikian. Menurut Pasal 156a dan 157 KUHP berbunyi:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan .¹¹

¹⁰ Skripsi yang ditulis oleh Bhima Adi Sujarwanto, “Analisis Yuridis PertanggungJawaban Hukum Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms). Diploma Thesis, Universitas Nasional, 2023, 10.

¹¹ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 35.

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 157

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarinya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemicidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Menurut Adami Chazawi, dua kejahatan termasuk dalam komponen Pasal 156a. Kejahatan yang pertama unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif. Ada beberapa undang-undang yang mengatur penodaan agama yang bisa disebutkan.

Menurut Adami Chazawi, dua kejahatan termasuk dalam komponen Pasal 156a:

1. Kejahatan yang pertama unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif. Secara obyektif, penistaan agama mencakup hal-hal seperti “mengekspresikan emosi, berperilaku

memusuhi penyalahgunaan penistaan agama, topiknya adalah agama yang dianut di Indonesia, dan dilakukan di depan umum". Namun, menurut saya, itu adalah kesalahan yang disengaja.

2. Ada komponen untuk jihad ganda aktual dan konseptual. Klausa tujuannya adalah, "Tindakannya mengeluarkan perasaan dalam arti melakukan perbuatan dengan dilakukan di depan umum." Tujuan dari komponen bawahan adalah untuk mencegah orang menolak segala bentuk agama yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Jika semua kriteria ini telah dipenuhi, maka penodaan agama dianggap telah dilakukan, dan kemudian diancam dengan hukuman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketika tindak pidana dan penodaan agama digabungkan, maka yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung semua komponen penodaan agama. Hal ini akan diperjelas dalam pembahasan berikut ini. Barangsiapa dengan sengaja mengungkapkan perasaan atau perbuatan di muka umum yang: (1) secara mendasar memusuhi, menghina, atau menodai suatu agama yang dianut di Indonesia; atau (2) dimaksudkan untuk menyurutkan orang untuk memeluk suatu agama yang tidak semata-mata beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Pancasila menjadi dasar yang

¹² Skripsi yang ditulis oleh M. Fawwazul Haqie, "Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw). UIN Syarif Hidayatullah, 2017, Hal. 21-22.

digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP. ¹³ Adapun rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 156a tersebut adalah:

1. Setiap orang
2. Di depan orang lain
3. Mencari penerimaan secara luas
4. Mengamalkan suatu kepercayaan yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan agama itu, dengan cara yang menyimpang dari inti ajaran agama itu.¹⁴

Pasal 156a sering digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam kasus penodaan agama, sehingga sering dimasukkan dalam klasifikasi penodaan agama sebagai bahan acuan utama. Selain itu, meskipun pasal ini dianggap multitafsir oleh sebagian kalangan, namun menurut pandangan lain, penodaan agama perlu tetap ada dalam KUHP untuk mencegah terjadinya penyimpangan, menegakkan kesucian agama, menjaga agar manusia tidak tersesat, dan menjaga perdamaian agama yang ada. berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵ Berlakunya Pasal 156a dari Pasal 4 yang mendekati norma hukum Pasal 3 keduanya memiliki kedudukan yang berbeda, menurut Mudzakkir:

Pertama, 156a KUHP merupakan delik yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada

¹³ Randy A Adare, “Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societis*, Vol. I No. 1 Jan-Mrt 2013, hlm. 94.

¹⁴ Ismahudi, “Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia”, hlm. 65.

¹⁵ Ibnu Tulaji Ahmad Al Mughoffary, “Analisis Muatan Materi Pasal Penodaan Agama dalam Kajian Politik Hukum Pidana”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang*, hlm. 60

hukum administrasi norma atau pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Sedangkan Pasal 4 mengatur perubahan KUHP khususnya Pasal 156a KUHP dan setelah undang-undang dinyatakan berlaku, keberadaan Pasal 156a KUHP tetap berlaku sendiri dan tidak merugikan. Ketentuan Pasal 3 merupakan sanksi pidana di bidang hukum administrasi yang digunakan sebagai andalan. Menurut pembacaan Pasal 156a KUHP, sanksi administratif harus diterapkan terlebih dahulu, dari yang paling ringan ke yang paling berat sebelum menerapkan sanksi pidana. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan yurisdiksi kepada aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat acara penegakan hukum pidana yang tidak atau tidak rentan terhadap kompetensi yudikatif. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan dan penegakan norma hukum pidana, KUHP sudah memuat rumusan hukum pidana dalam Pasal 156a yang komperhensif, sistematik, atau ada hubungannya dengan penjelasan umum dan penjelasan Pasal 4 atau 156a KUHP.¹⁶

Pasal ini memperhitungkan kemungkinan bahwa seseorang yang melakukan penodaan dapat berasal dari dalam kelompok agama itu sendiri atau dari keyakinan yang berbeda sama sekali. Seorang pemeluk Hindu boleh menghina agama Kristen secara lahiriah sedangkan seorang Muslim boleh menodai Islam secara batiniah, asalkan kedua perbuatan itu termasuk unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 156a.

¹⁶ Muhammad Fadlan Asif “Analisisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama”, hlm. 52-54.

b. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama dalam UU ITE

Meskipun hak untuk menjalankan keyakinan seseorang dilindungi oleh undang-undang, perlindungan tetap diperlukan. Dalam hal ini, penerapan jaminan diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156 dan 156a KUHP. Untuk mengendalikan kejahatan yang melibatkan informasi dan transaksi elektronik, serta yang dilarang jika dilakukan melalui situs jejaring sosial, diperlukan undangundang tambahan. Menanggapi tuntutan perkembangan teknologi dan informasi, pengaturan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini kemudian menjadi pedoman dan landasan bagi tindak pidana penodaan agama yang melibatkan data dan transaksi elektronik, dan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mendakwa pelakunya. Perbuatan yang dilarang tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28(e), Ayat 2. Pernyataan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa batas menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap orang tertentu. dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar umat (SARA)”*.¹⁷

Terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28(e) ayat (2), putusan

¹⁷ Pasal 28 (e) ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terkait penyebaran ujaran kebencian yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Secara singkat, UU No. 1/NPS/1965 dan Pasal 156 dan 156a KUHP samasama menyebut penodaan agama sebagai tindak pidana. Kedua undang-undang ini dapat menjadi salah satu panduan mendasar yang digunakan oleh otoritas penegak hukum untuk menangkap dan mengadili mereka yang menodai agama. Jika akta tersebut dilakukan melalui jejaring sosial, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan hukumnya.¹⁸

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana di media sosial dan sanksi hukumnya yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

¹⁸ Muhammad Andri Fauzan Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2013, hal 11.

- informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- f. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- g. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Salah satu bentuk tindak pidana di media sosial yang paling banyak ditangani oleh pihak kepolisian pada tahun 2019 adalah penyebaran informasi yang ditujukan untukmenimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹⁹

B. Jarīmah Riddah

1. Pengertian *Jarīmah Riddah*

Istilah *riddah* berasal dari kata *radda*, yang secara etimologi berarti berbalik kembali. Sedangkan secara terminologi *riddah* berarti kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman. Dalam literatur fiqh, *riddah* didefinisikan sebagai kembali (kepada kekafiran) dari Islam atau memutuskan (diri) dari Islam menurut Sayyid Sabiq, *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan dalam ensiklopedi Hukum Islam *riddah* dipahami sebagai keluar dari agama Islam menuju kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan baik dimaksudkan sebagai senda gurau, atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan. Pada mulanya, *riddah* adalah keluar dari Islam menuju kepada kekafiran, kemudian berkembang kepada segala perbuatan berupa pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Islam, atau

¹⁹Andrew Shandy Utama, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Media Sosial dan Sanksi Hukumnya, Prosiding-Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer (SEMASTER) Vol 1. No.1 2020 hlm. 277.*

penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, bahkan pandangan-pandangan yang keras terhadap Islam, dianggap sebagai kesesatan dan dinyatakan sebagai riddah, dan pelakunya disebut murtad. Klaim murtad berdasarkan kategori ini banyak dialami oleh tokoh-tokoh seperti: Nasr Hamid Abu Zayd, Faraj Fauda, dan Hassan Hanafi di Mesir, Mahmud Muhammad Taha di Sudan, Asim Nesindi Turki dan Taslima Nasreen di Bangladesh, dan mereka semua diancam hukuman mati.²⁰

Unsur-unsur *jarīmah riddah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kembali (ke Luar) dari Islam, unsur pertama dari *jarīmah riddah* adalah keluar dari islam, yang berarti seseorang meninggalkan agama setelah sebelumnya mempercayai dan meyakininya.

Keluar dari islam bisa terjadi dengan salah satu tiga cara, yaitu: dengan perbuatan atau menolak perbuatan, dengan uacapan (perkataan), dan dengan iktikad atau keyakinan.²¹ Keluar dari islam dengan perbuatan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh islam, menganggapnya boleh dilakukan atau tidak dianggap sebagai larangan, baik dengan sengaja atau dengan sikap meremehkan terhadap ajaran islam, bahkan menunjukkan sikap sombong. Contohnya seperti melakukan sujud kepada berhala, matahari, bulan, atau bintang, atau melemparkan al-Qur'an atau kitab *hadīs* ke tempat yang tidak layak, atau bahkan menginjak-nginjak atau menghina, serta tidak lagi mempercayai ajaran yang disampaikan oleh al-Qur'an.

²⁰Imroatul Azizah, *Sanksi Riddah Perspektif Maqasid al-Shari'ah*, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 5, Nomor 2, Oktober 2015 Hlm. 596.

²¹ Abd Al-Qadir Audah, II, *op. cit.*, hlm. 707.

Termasuk juga dalam kategori ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan haram seperti zina, pencurian, minum minuman keras (khamr), atau membunuh dengan keyakinan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dihalakan menurut keyakinan mereka.

Adapun yang dimaksud dengan menolak perbuatan adalah sikap seseorang yang enggan atau tidak mau melaksanakan perbuatan yang diwajibkan oleh agama (islam), karena ia yakin bahwa perbuatan tersebut tidak diwajibkan baginya. Contohnya seperti menolak untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, atau haji karena merasa bahwa semua itu tidak diwajibkan.

Seseorang juga dapat keluar dari islam melalui ucapan (perkataan), seperti ketika mereka mengeluarkan pernyataan dari mulut mereka yang mengandung unsur kekafiran. Contohnya termasuk menyatakan bahwa Allah memiliki anak, mengklaim diri sebagai nabi, mempercayai pengakuan seseorang sebagai nabi, mengingkari nabi, malaikat, dan hal-hal lain.

Selain itu, seseorang juga dapat keluar dari islam dengan iktikad atau keyakinan yang bertentang dengan ajaran islam. Contohnya termasuk keyakinan bahwa alam ini abadi, keyakinan bahwa Allah adalah makhluk, keyakinan bahwa manusia dapat menyatu dengan Allah, keyakinan bahwa al-Qur'an tidak berasal dari Allah, keyakinan bahwa nabi Muhammad adalah seorang pembohong, keyakinan bahwa Ali adalah seorang nabi atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan, dan segala keyakinan lain yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

- b. Adanya niat yang melawan hukum (kesengajaan), untuk dianggap melakukan *jarīmah* riddah seseorang harus dengan sengaja melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekafiran, sambil menyadari bahwa perbuatan atau ucapannya tersebut mengandung unsur kekafiran. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang secara tidak sengaja mengakibatkan kekafiran dan ia tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kekafiran, maka ia tidak dianggap sebagai kafir atau murtad. Contohnya jika seseorang secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata kufur “*La Ilaha*” (tidak ada Tuhan) dalam keadaan terkejut atau senang, hal itu tidak membuatnya secara otomatis menjadi kafir.

Imam Syafi’I menyatakan bahwa untuk terjadinya *jarīmah* riddah, seseorang harus sengaja berniat melakukan perbuatan kekufuran, dan tidak cukup hanya dengan melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang secara langsung mengandung unsur kekufuran. Alasannya adalah *hadīs* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Alqamah ia berkata:

“*Saya mendengar Umar Ibn Al-Khathab ra. berpidato, ia berkata: Saya mendengar Nabi SAW. bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya”*.²²

Dengan demikian, menurut pendapat mazhab Zhahiriyyah, jika perbuatan atau ucapan yang mengandung kekufuran tidak disertai dengan

²² Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, hlm. 202.

niat yang jelas untuk melakukan kekufuran, pelaku perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai kafir. Mazhab Zhahiriyyah mengharuskan adanya niat dalam setiap perbuatan, sebagaimana yang mereka yakini berdasarkan *hadis-hadis* yang mereka pegang. Bagi mereka, semua perbuatan yang tidak disertai dengan niat dianggap batal dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berlaku.²³

Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah untuk terjadi *jarīmah* riddah cukup dengan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kekafiran, tanpa harus ada niat yang jelas untuk melakukan kekafiran. Mereka berpendapat bahwa tindakan atau ucapan yang mengandung unsur kekafiran sudah cukup untuk dianggap sebagai *jarīmah* riddah, asalkan pelaku secara sadar dan mengerti arti dari perbuatannya. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad juga berpendapat bahwa perbuatan atau ucapan yang dilakukan dengan main-main dapat mengakibatkan kekafiran jika arti dari perbuatan atau ucapan tersebut adalah kufur, dan pelaku perbuatan tersebut memiliki kebebasan untuk bertindak serta memahami arti dari perbuatannya. Menurut mereka meskipun keimanan (tashdiq) secara hukum menjadi hilang, namun secara hakiki masih ada.²⁴

2. Sanksi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Riddah

Dalam Islam, seperti yang tertera dalam kitab-kitab fikih klasik, sanksi bagi orang yang murtad adalah hukuman mati. Sa'id Ramadan al-Buti

²³ Abd Al-Qadir Audah, II, *op. cit.*, hlm. 719.

²⁴ *Ibid*, hlm. 720.

menjelaskan bahwa meskipun semua kitab fikih klasik memberikan sanksi hukuman mati bagi pelaku riddah, namun tidak ditemukan dalil al-Qur'an yang secara jelas menegaskan sanksi hukuman dunia bagi orang yang keluar dari Islam, selain bahwa orang tersebut akan mendapatkan sanksi yang pedih di akhirat. Argumen bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas menerangkan hukuman mati bagi apostasi juga didukung dalam beberapa artikel dan jurnal Islam. Salah satu dalil pemberar sanksi dunia yaitu pembunuhan terhadap pelaku riddah adalah *hadīs* yang diriwayatkan al-Bukhari, al-Tirmidzi, al-Nasa'I, Ibn majah, dan Ahmad dari jalur yang berbeda-beda, dan *hadīst* dari Abdullah ibn Mas'ud yang bisa dilacak pada kitab sahih Bukhari dan Muslim. Semua *hadīs* ini statusnya *ahad*, dan tidak satu pun yang masuk dalam kategori *mutawatir*. Atas dasar ini, kritik pertama yang terlontar adalah kritik teks terhadap kedua *hadīs* tersebut.

Mahmud Shaltut mengatakan bahwa al-Qur'an hanya berbicara tentang hukuman di akhirat, dan *hadīs* Ibn 'Abbas tersebut memunculkan respon yang serius dari para ulama yang sebagiannya sepakat bahwa hudud tidak dapat dibangun dengan *hadīs ahad*, dan kekafiran itu sendiri tidak menyerukan hukuman mati. Pernyataan Nabi tersebut terjadi pada musim perang, yaitu ketika ada sebagian tentara Islam yang berjiwa munafik melakukan tindakan desersi (pengkhianat negara), maka yang desersi diperintahkan untuk dibunuh, itupun diawali dengan upaya menyadarkan si pelaku agar kembali kepada Islam. Jadi faktor kunci yang menentukan hukuman mati adalah permusuhan terhadap Islam dan kebutuhan untuk mencegah fitnah

terhadap agama dan negara. Itupun dengan dasar hukuman *ta'zīr*, bukan *had*.²⁵

Pemikir kontemporer seperti Moh. Hasyim Kamali juga sepakat dengan pendapat Shaltut, dan ikut mempertanyakan jumlah tindak pidana yang digolongkan dalam *hudud*.²⁶ Louay Safi menekankan bahwa kedua *hadīs* yang dijadikan dasar sanksi riddah tidak dapat dijadikan dalil yang terpercaya karena bertentangan dengan banyak dalil al-Qur'an. Dan menurut pendekatan *maqasid*, sebuah *hadīs* memang dapat membatasi penerapan al-Qur'an yang umum, namun tidak bisa menegasinya.²⁷

Di samping itu, banyak ulama yang mempertanyakan relevansi dan validitas sanksi tersebut. Di antara mereka adalah: Shams ad-Din ash-Sharakhsyi yang menyatakan bahwa riddah tidak tepat dikenakan sanksi hukuman di dunia. Walaupun konversi agama merupakan dosa besar, namun itu urusan dirinya dengan Tuhan, dan hukumannya ditunda sampai hari pembalasan. Pendapatnya ini sama dengan para mufassir ketika menafsirkan ayat 217 al-Baqarah tentang riddah.²⁸

Yang menarik, hampir semua kitab fikih mengarah kepada satu pemberian adanya sanksi bunuh terhadap pelaku riddah jika pelakunya adalah berjenis kelamin laki-laki dan memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu berakal dan tidak dipaksa.

²⁵Mahmud Shaltut, *al-Islam Aqidah wa Shari'ah*, cet. 13, (Kairo: Dar ash-Shuruq, 1997), 281-289.

²⁶Moh. Hasyim Kamali, *Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments* (Kuala Lumpur: Islamic Publisher, 2000), 217 dan *Punishment in Islamic Law, an Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1995), 33-34.

²⁷Louay Safi, *Human Rights and Islamic Legal Reform*, <http://home.att.net/~l.safi/articles/1999human.html>.

²⁸Hams ad-Din ash-Sharakhsyi, *al-Mabsut*, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 1993), X: 110.

Sementara jika pelakunya adalah perempuan, dalam pandangan madhab *Maliki, Shafi'i, dan Hanbali*, mereka tetap juga dieksekusi, sedangkan menurut madhab *Hanafi dan Shi'ah*, ia hanya dipenjara sampai bertaubat dan menyesali perbuatannya serta kembali kepada Islam. Alasannya, perempuan secara politik tidak berbahaya. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* juga dijelaskan bahwa dalam perjalannya, konsep *riddah* mengalami perluasan makna. Pada mulanya, *riddah* adalah keluar dari Islam menuju kepada kekafiran, kemudian berkembang kepada segala perbuatan berupa pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Islam, atau penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, bahkan pandangan- pandangan yang keras terhadap Islam, dianggap sebagai kesesatan dan dinyatakan sebagai *riddah*, dan pelakunya disebut murtad.²⁹

Klaim murtad berdasarkan kategori ini banyak dialami oleh tokoh- tokoh seperti: Nasr Hamid Abu Zayd, Faraj Fauda, dan Hassan Hanafi di Mesir, Mahmud Muhammad Taha di Sudan, Asim Nesindi Turki dan Taslima Nasreen di Bangladesh, dan mereka semua diancam hukuman mati. Atas dasar ini maka wajar jika ‘Alal al-Fasil menjelaskan bahwa sanksi hukuman mati bagi pelaku *riddah* bukan karena mereka keluar dari Islam atau kufur, tapi lebih karena pengkhianatan mereka terhadap agama Islam. Pernyataan ini dikuatkan oleh al-Buti bahwa dengan demikian ‘illat dari sanksi hukuman mati bagi murtad bukanlah *kufr* seperti diasumsikan oleh mayoritas ulama Shafi’iyah melainkan hirabah. Abdullah Saeed memperkuat pendapat ini dengan melihat perjalanan historis, di mana konsep *riddah* bermula ketika Abu

²⁹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Toha Putera, t.t.), III: 77 dan dirangkum oleh Abd al-Karim Zaydan, *al-Uqubah fi ash-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Mu'assasahar-Risalah, 1988), 34.

Bakar menghukum para pembangkang zakat dan karena kepentingan politik kaum murji'ah.³⁰

Muhammad at-Tahir ibn 'Ashur juga senada dengan al-fasi, dimana ia menjelaskan bahwa hikmah dijatuhkannya hukuman mati bagi murtad adalah untuk *saddadhdhara'i* terjadinya pengkhianatan terhadap Islam.³¹ Perdebatan apakah riddah termasuk *hudud* ataukah *ta'zir* mengarahkan pada perlunya kepastian hukuman bagi orang murtad, karena jika ancaman hukumannya adalah 'dibunuh', dianggap tidak sesuai dengan penegasan al-Qur'an tentang kebebasan beragama (2: 265, 2: 148, 10: 99, 109: 6; 60: 8, 18: 29, dan 5: 48) dan intoleran, dan karena alasan ini pula Islam dicap negatif, karena bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM pasal 18 dan 17. Dengan demikian, selain kritik teks, kritik lain terhadap konsep riddah didasarkan pada pentingnya penegakan isu-isu HAM dan *freedom of belief*. Di samping Riffat Hassan, tokoh lain yang *concern* pada masalah ini adalah Abdullah Ahmed an Na'im yang berpendapat bahwa semestinya tindak criminal *hudud* terbatas pada empatmacam (*sariqah, zina, qadhf, dan hirabah*), sedangkan *sukr* dan *riddah* tidak termasuk, karena hukuman untuk *sukr* tidak ada ketentuannya yang pasti, sedangkan *riddah*, hukumannya bertentangan dengan HAM tentang kebebasan beragama yang justru didukung oleh sejumlah ayat al-Qur'an.

Ibn Dakik al Aid, Ibn Hazm, dan Imam al Nawawi menyatakan bahwa ada consensus bagi pelaku *jarimah riddah* adalah dihukum dengan hukuman mati. Kesimpulan

³⁰Alal al-Fasi, *Maqasid ash-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Cassablanca: Maktabah al Wihdah al-Arabiyyah, t.t.), 249.

³¹David Little, John Kelsey, Abdul Aziz A. Sachedina, dan Terj. Riyanto, *Kebebasan Agama dan HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 109-111.

ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa khalifah pertama, Abu Bakar, berperang melawan orang-orang murtad pada masa sahabat. Tetapi Umarra. Juga, sebagai sahabat utama Nabi SAW. Seperti yang dinyatakan bahwa hukuman bagi pelaku *jarimah riddah* adalah penjara. Hal ini berkaitan ketika Umar dihadapkan dengan salah satu kasus orang yang murtad yang dibawa kehadapannya, Umar berpandangan bahwa pelaku *jarimah riddah* harus diajak kembali kepada agama Islam. Tetapi apabila ia tidak mau kembali ke agama Islam, maka ia di beri sanksi masuk penjara sampai ia mau kembali kepada agama Islam. Menurut informasi Abd al-Razzaq, al-Baihaqi dan Ibn Hazm, Anas suatu hari mengajukan kepada Umar bahwa ada enam orang yang murtad dan bergabung dengan pasukan musuh. Anas bertanya, “apakah ada sanksi lain selain hukuman mati bagi mereka?”, Umar menjawab, “Ya, saya akan membawa mereka kembali ke dalam agama Islam. Jika mereka menolak, maka saya akan memasukkan mereka kedalam penjara”.

Ibn Taimiyah (Taimiyah) membagi murtad menjadi dua macam, yaitu: pertama *riddah mughallazhah* (murtad berat). kedua, *riddah mukhaffafah* (murtad ringan). *Riddah mughallazhah* ialah kemurtadan yang diiringi dengan aksi permusuhan dan perang melawan Islam. Sedangkan *riddah mukhaffafah* ialah kemurtadan tanpa diiringi dengan aksi yang menunjukkan permusuhan atau provokasi terhadap agama Islam. Meskipun kedua bentuk murtad tersebut dapat dijatuhi hukuman mati, namun dalam ranah implementasi terdapat perbedaan. Murtad dalam bentuk pertama dijatuhi hukuman mati tanpa menunggu orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam. Sedangkan murtad dalam bentuk kedua, yang bersangkutan diminta untuk bertaubat, dengan cara memberi penjelasan untuk meluruskan pemahamannya terhadap hal-hal yang menyebabkan dirinya murtad. Jika yang bersangkutan bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman mati. Akan tetapi, apabila setelah proses penyadaran tersebut dilakukan dan telah lewat waktu tiga hari, sedangkan yang bersangkutan belum juga bertaubat dari kemurtadannya, maka kepadanya dijatuhi

hukuman mati. Diantara *hadīs* nabi yang menjelaskan hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah *hadīs* yang diriyawatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi: Barangsiapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia (HR. Bukhari).

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (لَا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الشَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفَّصُ
بِالنَّفْسِ، وَالثَّارُكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِي
وَمُسْلِمٌ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim (untuk ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari 3 perkara: tsayyib (orang yang sudah menikah) yang berzina, jiwa dengan jiwa (qishash) dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) serta memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin)." (HR al Bukhari dan Muslim).

Menurut Maulana Muhammad Ali maksud dari kedua *hadīs* adalah orang yang mengubah agamanya dan bergabung dengan musuh-musuh Islam, lalu bertempur melawan kaum muslimin. Karena *hadīs* tersebut berhubungan dengan waktu perang. Jadi perbuatan *riddah* yang dihukum mati itu bukan karena disebabkan mengubah agamanya, melainkan karena pengingkaran. Dr.Muhammad Abid al-Jabiri menjelaskan bahwa kandungan makna *riddah* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

Bentuk pertama, murtad hanya meninggalkan keyakinan, tanpa meyebarkan provokasi kepada Muslim lainnya untuk meninggalkan agama Islam serta tidak melakukan perrusuhan kepada agama

Islam dan pemeluknya. Menurut al-Jabiri, hukuman untuk bentuk kemurtadan yang pertama adalah sanksi di hari kiamat kelak, karena belum didapatkan satu dalilpun yang menunjukkan bahwa hukuman untuk pelaku *riddah* di dunia.³² Dalil yang dipakai oleh al-Jabiri, antara lain:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَئِنٌ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَيْنِيهِمْ غَضَبٌ مِنَ
اللَّهِ وَهُنَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (Q.S. An- Nahl: 106)

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَمْنَوْا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا
لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَعْفُرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَيِّئًا

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan member ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. (Q.S. an-Nisa: 137)³³

³² Muhammad Abid al-Jabiri, “*Hukm al-Murtad fi al-islam*”, dalam *Jaridah al-Ittihad* (14 Agustus 2007), h.5.

³³ Tim Penerjemah, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, 100.

Ayat-ayat tersebut di atas menerangkan sangat jelas hukuman bagi pelaku *riddah* adalah lakanat dari Allah serta amal-amalnya juga dihapuskan, dan di akhirat kelak mendapatkan siksa neraka. Tidak terdapat satu ayat al- Qur'an pun yang mengisyaratkan hukuman mati terhadap pelaku *riddah* di dunia. Bentuk kedua, *murtad* dengan sikap melawa terhadap pemerintahan Islam dan umat Islam. Hukuman setara dengan pelaku pemberontakan dan penentangan terhadap Negara Islam dan Masyarakat Islam, seperti dibahas dalam buku-buku fikih klasik. Sanksi yang diberikan kepadanya tergantung pada berat dan ringannya kejahatan yang dilakukan. Maka dari itu, para ahli ilmu fikih sepakat bahwa hukuman terhadap orang yang *murtad* dengan disertai pemberontakan fisik adalah eksekusi mati. Menurut sebagian ulama, para pelaku *jarimah riddah* yang tidak sempat melakukan pemberontakan diberi waktu untuk bertaubat dan kembali kepada Islam, dan jika ia kembali memeluk Islam maka dilepaskan dari sanksi mati. Jadi, dari beberapa pendapat ulama di atas bisa disimpulkan bahwa faktor terpenting yang menentukan hukuman mati bagi orang yang *murtad* adalah permusuhan dan penyebaran fitnah terhadap agama. Jika tidak ada permusuhan terhadap agama maka hukumannya sebagaimana keputusan hakim karena hukuman *riddah* masuk dalam ranah hukuman *ta'zir*, bukan hukuman had.³⁴

Dasar hukum *riddah* dalam al- Qur'an yaitu:

a. Surah Al-Baqarah (2): 217³⁵

يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الشَّهْرِ الْحُرَمِ قِتَالٌ فِيهِ فَلَئِنْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحُرَاجِ
أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَتْنَى وَلَا يَرَأُونَ

³⁴ Andi Mardika "Sanksi Jarimah Riddah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Teori Hifzu Al-Din)". *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (8) (2021): 2551-2553.

³⁵ Tim Penerjemah, "Al-Quran dan Terjemahannya", 34.

يُفَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرْدُوْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ
يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيُمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حِطَّ
أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَلِدُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripad apembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu diamat idalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu lah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

b. Surah An-Nisa (4): 137³⁶

إِنَّ الَّذِينَ امْنَوْا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امْنَوْا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ارْدَادُوا كُفَّارًا مُّ
يُكَفِّرُ اللَّهُ لِيَعْفُرَ لَهُمْ وَلَا لَيَهْدِيَهُمْ سَيِّلًا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan member ampunan kepada mereka, dan tidak

³⁶ Tim Penerjemah, “Al-Quran dan Terjemahannya”, 100.

(pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus”.

c. Surah Ali Imran (3): 85³⁷

وَمَنْ يَتَنَعَّمْ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْحَسَرِينَ

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.

Dalil pemberi sanksi dunia bagi pelaku *riddah*, yaitu dihukum mati, Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Muadz berkata:

قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ أَوْ قَالَ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Allah dan Rasul-Nya menetapkan bahwa siapa saja yang kembali dari agamanya maka bunuhlah”, atau Muadz berkata, “Siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah”. (HR Ahmad).

³⁷ Tim Penerjemah, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, 61.

BAB III

PUTUSAN TENTANG PENODAAN AGAMA Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg

A. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg

1. Deskripsi Kasus

Pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan asistennya pergi ke Rumah Makan Babi Guling SisinTukad di Jalan Sri Rama No. 8, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Mereka mengucapkan “Yok cobain kriuk babi” dan sengaja memesan hidangan tersebut. Ketika makanan kriuk babi sudah siap disajikan, terdakwa meminta asistennya untuk merekam video menggunakan iPhone 14 Pro Max warna ungu. Video tersebut diunggah ke akun TikTok @lilumukherjee dengan durasi 1 menit 40 detik dan diakses oleh 4,5 juta penonton. Selain itu, video juga diunggah ke akunYoutube @linamukherjee yang kemudian ditonton oleh 420.901 penonton.

Pada waktu dan tempat yang disebutkan, saksi Syarif Hidayat Bin Syamsudin sebagai seorang warganet melihat konten video tersebut, terdakwa terlihat sedang makan kriuk babi sambil berkata: “Bismillah, eh lupa guys. Hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya, jadi hari ini rukun iman udah aku langgar udah pasti di kartu keluargaku dicabut tapi aku cuma penasaran karena di tiktok ku banyak kriuk yaa, tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya, kemarin makan dagingnya biasa aja, kak lili udah berapa kali makan babi? totalnya tiga kali ya. Pertama di Srilanka, waktu itu aku ga sengaja

makan, aku ga bisa bahasa inggris pok gitu kan, aku pikir pok itu tepok pok pok pok jadi waktu usia ku masih dua puluh empat tahun, terus abis makan babi aku Tanya sama ex akuk an, eh masjid dimana? gaya-gaya nanya masjid, udah makan (tertawa). Terus yang kedua kemaren ada acara di tempatnya non ya non, terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri yaa. Cuma pengen rasain kek apasih rasanya kriuk babi yang rame di.... Ya allah dipecat ini dari kartu keluarga. Kok rasanya kayak ini yaaa, kriuk babi kayak daging sapi yang dijemur yang keras ga seenak orang yang cerita di tiktok sih aku ya, kalo aku b ajaa, yaallah takut ada yang masuk puskesmas ni keluargaku. Maafkan aku ya cuma konten kok”

Setelah menonton video tersebut, saksi Syarif Hidayat Bin Syamsudin merasa sangat tidak suka dan marah, serta mengecam video yang dibuat terdakwa dianggapnya telah menghina agama islam dengan menggunakan kata-kata “Bismillah, Ya Allah” saat makan kriuk babi. Reaksi serupa juga dirasakan oleh beberapa warganet lain yang menonton video tersebut, termasuk saksi Martinawati Binti H. Basarudin, saksi Husyam Bin Usman, saksi Zakarshi Bin Jasmani, dan saksi Sapradji Bin Syamsudin. Mereka semua merasa sangat benci, resah, dan percaya bahwa agama mereka telah dilecehkan. Kemudian saksi Sapradji Bin Syamsudin menghubungi KH. Khobir Asyari seorang ulama untuk meminta pendapatnya tentang konten video tersebut. KH. Khobir Asyari menjelaskan bahwa video yang menampilkan makan kriuk babi oleh terdakwa merupakan bentuk penghinaan terhadap agama Allah, karena cara video tersebut disebarluaskan di media sosial bisa mengganggu orang-orang yang tidak memiliki keyakinan agama yang kuat, dan hal tersebut merupakan hal-hal yang melanggar nilai-nilai sila pertama dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi Syarif Hidayat melaporkan tindakan terdakwa kepada POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah video makan kriuk babi terdakwa diposting di akun Tiktok @lilumukerji mendapat berbagai komentar dari warganet yang bersifat pro dan kontra. Komentar-komentar ini memicu perselisihan diantara mereka dengan saling menyerang dan membuat suasana menjadi tegang di kalangan warganet. Mereka yang merasa resah dan tidak menyukai video tersebut merasakan kebencian dan permuksuhan yang meningkat di platform tersebut. Beberapa warganet bahkan sudah menegur terdakwa, mengingatkan bahwa sebagai seorang muslim dan seorang muslimah seharusnya tidak pantas memposting diri sedang makan kriuk babi yang diharamkan dalam Islam. Namun, terdakwa merespons komentar dan nasihat tersebut dengan kesal, merasa bahwa tindakannya tidak salah karena video makan kriuk babi tersebut di posting pada siaran langsung akun TikTok. Tindakan terdakwa ini semakin membuat warganet geram dan merasa tidak nyaman terhadap sikap terdakwa tersebut. Mereka merasa terdakwa rela mengorbankan nilai-nilai agamanya hanya demi konten yang dapat membuatnya terkenal di dunia maya. Lebih buruknya lagi, perilaku terdakwa ini dianggap bisa menjadicontoh buruk yang bisa ditiru oleh anak-anak dan generasi muda Islam lainnya, yang mungkin akan melakukan tindakan yang dilarang dalam agama Islam hanya untuk membuat video viral.¹

¹Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

2. Dakwaan

Terdakwa di tuntut oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya menyatakan bahwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE BINTI ABDUL MUKHIT, Pada tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, di lokasi yang disebutkan di Jalan Inspektur Marzuki, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atau di akun TikTok @lilumukherji atau di akun YouTube @Linamukherjee, atau di tempat lain yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang, seseorang dinyatakan bersalah atas penyebaran informasi dengan sengaja dan tanpa hak yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diakibatkan karena telah melakukan tindakan yang dirasa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).²

3. Tuntutan

Tuntutan pidana adalah permohonan yang diajukan oleh jaksa kepada pengadilan setelah persidangan selesai dan pemeriksaan oleh hakim berakhir. Dalam tuntutan pidana, jaksa menyatakan bahwa menurut pandangan mereka pelaku tindak

²Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

pidana terbukti bersalah dan meminta pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku sesuai dengan yang dianggap pantas. Dalam tuntutan pidana akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana dapat sama dengan maksimal ancaman pidana, dapat lebih rendah atau dalam beberapa kasus dapat melebihi maksimal ancaman pidana yang ditetapkan.³

Adapun tuntutan pidana yang dijatuhan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁴

1. Menyatakan terdakwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE BINTI ABDUL MUKHIT telah dinyatakan bersalah atas penyebaran informasi dengan sengaja dan tanpa hak yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat berdasarkan atas agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pidana tersebut dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah djalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar RP. 250.000.000,- dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 95.

⁴Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor HP 085691200801
 - 1 (satu) buah akun tiktok @lilumukerji link <https://www.tiktok.com>
 - 1 (satu) unit handphone jenis IPhone 14 Pro Max warna purple (ungu)
Dikembalikan kepada terdakwa;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 4. Amar Putusan**
- Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg adalah sebagai berikut:⁵
1. Menyatakan terdakwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE BINTI ABDUL MUKHIT bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

⁵Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor HP 085691200801;
 - 1 (satu) buah akun tiktok @lilumukerji link <https://www.tiktok.com>
Dirampas negara untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Jenis Iphone 14 Pro Max Warna Purple (ungu)
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg)

A. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Menurut Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim atau disebut juga *Ratio Decidendi* merupakan pendapat, alasan, dasar ataupun faktor yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan suatu perkara. Sebagai aturan, hakim memperhitungkan 2 (dua) jenis faktor ketika mempertimbangkan suatu kasus di pengadilan, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Dan diberikan Undang- Undang sebagai unsure wajib dalam putusan. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP menyatakan: “Dibuat pertimbangan singkat mengenai fakta dan keadaan, serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar untuk menetapkan kesalahan terdakwa”. Pertimbangan hukum dalam perkara pidana yang didakwakan merupakan unsur penting yang harus dicantumkan dalam putusan hakim, karena berdasarkan pertimbangan hukum itulah dapat disimpulkan apakah perbuatan terdakwa dilakukan dan apakah sesuai dengan kejahatan yang didakwakan. Kepengadilan jaksa/penuntut dan sebagainya. Faktor-faktor yang dimaksud sebagai pertimbangan hukum antara lain: surat dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan

saksi, alat bukti, serta pasal-pasal hukum pidana. Pasal hukum pidana yang tertera yaitu Penodaan agama secara umum dipahami sebagai perlawanan terhadap hal-hal yang dipuja atau dilarang (tabu), seperti simbol agama, otoritas agama, atau kitab suci agama. Kata-kata atau tulisan-tulisan yang memusuhi keyakinan aliran utama adalah contoh penodaan agama secara umum. Penodaan agama tidak memiliki definisi atau pemahaman yang tepat dalam hukum. Penodaan agama tidak secara jelas didefinisikan atau dijelaskan baik dalam Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a KUHP (pasal penodaan agama). Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur penodaan agama yang bisa disebutkan. Penodaan agama adalah suatu perbuatan yang dilarang menurut pasal 156a KUHP. Menurut Pasal 156 dan 157 KUHP.¹

Menurut Adami Chazawi, dua kejahatan termasuk dalam komponen Pasal 156a. Kejahatan yang pertama

¹ Pasal 156 yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia,
- Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 157 yang berbunyi:

- “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarinya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur penodaan agama yang bisa disebutkan. Menurut Adami Chazawi, dua kejahanan termasuk dalam komponen Pasal 156a:

1. Kejahanan yang pertama unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif. Secara objektif, penodaan agama mencakup hal-hal seperti “mengekspresikan emosi, berperilaku memusuhi penyalahgunaan penodaan agama, topiknya adalah agama yang dianut di Indonesia, dan dilakukan di depan umum”.
2. Ada komponen untuk jihad ganda aktual dan konseptual. Klausanya tujuannya adalah, “Tindakannya mengeluarkan perasaan dalam arti melakukan perbuatan dengan dilakukan di depan umum.” Tujuan dari komponen bawahannya adalah untuk mencegah orang menolak segala bentuk agama yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Jika semua kriteria ini telah dipenuhi, maka penodaan agama dianggap telah dilakukan, dan kemudian diancam dengan hukuman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketika tindak pidana dan penodaan agama digabungkan, maka yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung semua komponen penodaan agama. Hal ini akan diperjelas dalam pembahasan berikut ini. Barang siapa dengan sengaja mengungkapkan perasaan atau perbuatan di muka umum yang: (1) secara mendasar memusuhi, menghina, atau menodai suatu agama yang dianut di Indonesia; atau (2) dimaksudkan untuk menyurutkan

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal)*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 239.

orang untuk memeluk suatu agama yang tidak semata-mata beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Pancasila menjadi dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP.³ Adapun rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 156a tersebut adalah:

1. Setiap orang
2. Di depan orang lain
3. Mencari penerimaan secara luas
4. Mengamalkan suatu kepercayaan yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan agama itu, dengan cara yang menyimpang dari inti ajaran agama itu.⁴

Pasal 156a sering digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam kasus penodaan agama, sehingga sering dimasukkan dalam klasifikasi penodaan agama sebagai bahan acuan utama. Selain itu, meskipun pasal ini dianggap multitafsir oleh sebagian kalangan, namun menurut pandangan lain, penodaan agama perlu tetap ada dalam KUHP untuk mencegah terjadinya penyimpangan, menegakkan kesucian agama, menjaga agar manusia tidak tersesat, dan menjaga perdamaian agama yang ada berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Berlakunya Pasal 156a dari Pasal 4 yang mendekati norma hukum Pasal 3

³Randy A Adare, “*Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*”, *Jurnal Lex Et Societis*, (Vol. I/No. 1 Jan-Mrt 2013), hlm. 94.

⁴Ismahudi, “*Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia*”, hlm. 65.

⁵Ibnu Tulaji Ahmad Al Mughoffary, “*Analisis Muatan Materi Pasal Penodaan Agama Dalam Kajian Politik Hukum Pidana*”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang*, hlm. 60

keduanya memiliki kedudukan yang berbeda, menurut Mudzakkir:

Pertama, 156a KUHP merupakan delik yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hukum administrasi norma atau pengenaan sanksi administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Sedangkan Pasal 4 mengatur perubahan KUHP, khususnya Pasal 156a KUHP, dan setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku, keberadaan Pasal 156a KUHP tetap berlaku sendiri dan tidak merugikan ketentuan. Pasal 3 merupakan sanksi pidana di bidang hukum administrasi yang digunakan sebagai senjata terakhir yang digunakan sebagai andalan. Menurut pembacaan Pasal 156a KUHP, sanksi administratif harus diterapkan terlebih dahulu, dari yang paling ringan ke yang paling berat, sebelum menerapkan sanksi pidana. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan yurisdiksi kepada aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat acara penegakan hukum pidana yang tidak rentan terhadap kompetensi yudikatif. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan dan penegakan norma hukum pidana, KUHP sudah memuat rumusan hukum pidana dalam Pasal 156a secara komperhensif, sistematik, atau tidak *parsial* (sesuatu yang sifatnya lebih masuk ke bagian keseluruhan) dalam hubungannya dengan penjelasan umum dan penjelasan Pasal 4 atau 156a KUHP.⁶

Pasal ini memperhitungkan kemungkinan bahwa seseorang yang melakukan penodaan dapat berasal dari dalam kelompok agama itu sendiri atau dari keyakinan yang berbeda sekali. Contohnya seorang pemeluk Hindu boleh menghina agama

⁶Muhammad Fadlan Asif “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama”, hlm. 52-54.

Kristen secara lahiriah, sedangkan seorang Muslim boleh menodai Islam secara batiniah, asalkan kedua perbuatan itu termasuk unsur- unsur yang tercantum dalam Pasal 156a.

b. Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis

Kepastian hukum menekankan bahwa hukum atau peraturan diterapkan sesuai dengan persyaratan hukum atau peraturan. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus dihormati). Nilai sosiologis menekankan manfaat bagi masyarakat. Dalam mengadili suatu perkara dan mempertimbangkan apakah seseorang telah dipidana, hakim bersandar pada keyakinan hakim dan bukan hanya pada bukti-bukti yang ada.⁷ Berikut adalah keadaan-keadaan yang tergolong pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kekayaan pribadi terdakwa, dan agama terdakwa.

Putusan Pengadilan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg dalam memutuskan suatu perkara pidana penodaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial oleh Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee Binti Abdul Mukhit, majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan beberapa poin, yakni:

Terdakwa telah memposting video makan kriuk babi dengan menyebut lafadz “*Bismillah*” yang menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Video tersebut mendapat perhatian luas dan menimbulkan perpecahan serta kebencian.

Penuntut umum mengajukan saksi-saksi dan ahli untuk membuktikan bahwa tindakan terdakwa merupakan penyebaran informasi yang dimaksudkan

⁷Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung,2007, hlm. 213.

untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan agama.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa secara sengaja melakukan tindakan tersebut untuk menarik perhatian publik dengan mengabaikan dampak negatif terhadap perasaan umat Islam. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dakwaan tunggal Penuntut Umum ini terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Sedangkan majlis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan dikarenakan menimbang penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah Masyarakat.

Sudut pandang etika dan sosial, mengonsumsi sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan agama tertentu, seperti babi dalam konteks Islam, seharusnya

dilakukan dengan bijak dan tidak dipublikasikan di media sosial. Meskipun seseorang mungkin memiliki kebebasan pribadi dalam melakukan tindakannya, mempublikasikan hal-hal yang sensitif di platform publik dapat menyinggung perasaan umat beragama, terutama jika tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang dihormati.

Dalam kasus Lina Mukherjee, permasalahan utamanya bukan hanya pada tindakannya mengonsumsi babi, tetapi juga fakta bahwa dia membagikan tindakan tersebut di media sosial dengan sadar.

Ini berpotensi memicu reaksi negatif dari masyarakat yang beragama, karena:

1. Penistaan simbol keagamaan: Tindakan tersebut mungkin dipandang sebagai tidak menghormati larangan agama yang jelas terhadap babi, terutama jika dilakukan di depan publik dan secara sadar dipublikasikan. Hal ini menambah kesan tidak hormat terhadap nilai-nilai agama.
2. Kehormatan dan sensitivitas agama: Media sosial adalah platform yang sangat luas dan dapat menjangkau berbagai kalangan, termasuk yang mungkin merasa sangat tersinggung. Apa yang mungkin dianggap sebagai tindakan pribadi bisa berubah menjadi masalah sosial besar saat dipublikasikan.
3. Tanggung jawab sosial: Dalam masyarakat yang plural dan beragama, setiap individu diharapkan memiliki tanggung jawab sosial untuk menghormati keyakinan orang lain. Publikasi tindakan yang bertentangan dengan nilai agama tertentu, terutama di platform publik, dapat dilihat sebagai pelanggaran

tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, walaupun seseorang memiliki hak pribadi untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka, ketika hal tersebut dibagikan secara publik, ada tanggung jawab sosial yang harus dipertimbangkan, terutama dalam menjaga harmoni dan tidak menyinggung keyakinan orang lain.

B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam

Penodaan agama dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang dapat menjadi perusak sebuah akidah, yang mana pelaku penodaan agama diancam dengan dosa besar, hal tersebut karena bertentangan dengan norma agama Islam dalam Al-Qur'an.⁸ Tindakan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, hadits, dan juga penafsiran yang mu'tabar itu merupakan bagian dari penodaan dan juga menyekutukan-Nya, menghina dan menyakiti Nabi Muhammad Saw. serta para sahabatnya juga merupakan bagian dari penodaan agama.

Belum diatur secara terperinci dalam hukum Islam bagaimana kategori-kategori penodaan agama, serta sanksi-sanksinya. Tetapi dapat dipahami bahwa yang masuk dalam kategori penodaan agama yang divonis hukuman mati menurut sebagian ulama adalah menghina Al-Qur'an, hadits dan mengaku sebagai seorang Nabi. Para ulama sepakat bahwa seorang muslim yang menghina Al-Qur'an dalam keadaan sadar dan tahu ia telah melakukan penghinaan terhadap Al-Qur'an, maka dia dianggap telah murtad dan pantas diberikan sanksi

⁸Adnani, 2017, *Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, Al-Qadha*, Vol. 4 No. 1. hlm. 1.

hukuman mati. Salah seorang ulama besar *al-Syafi'iyyah*, yakni Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* berkata:⁹

"Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menghina Al-Qur'an atau sesuatu dari Al-Qur'an, atau mushaf, atau melemparkannya ketempat kotoran, atau mendustakan sesuatu yang datang dari Al-Qur'an, baik itu berupa hukuman atau informasi, atau menafikan sesuatu yang telah ditetapkan Al-Qur'an, atau menetapkan sesuatu yang telah dinafikan Al-Qur'an, atau meragukan sesuatu dari hal tersebut, sedang dia mengetahuinya, maka ia telah kafir. (Yahya bin Syaraf al-Nawawi, th: 196)".

Menurut ajaran Islam bahwa hukuman bagi murtad adalah hukuman mati, dan hal ini berdasarkan ijma' ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu al-Mundzir. Ibnu al-Mundzir berkata:¹⁰

"Para ulama telah sepakat bahwa apabila seorang hamba (muslim) murtad, lalu dia telah diminta bertaubat, tetapi dia tidak bertaubat, maka dihukum mati. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. (Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Mundzir, 1420: 174)".

Non-Muslim yang menghina Al-Qur'an diterapkan juga terhadap mereka hukuman mati, disamakan dengan hukuman muslim yang menghina Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hukum negara Islam (*Khilafah*) yang mana kedudukan muslim dan non-muslim sama di hadapan hukum Islam. Syekh Ali bin Nayyif al-Syahud dalam kitabnya *Al-Khulashah fi Ahkam Ahli Al-Dzimmah wa Al Musta'manin* berkata:¹¹

"Apabila salah seorang dari Ahli Dzimmah melakukan salah satu kejahatan yang masuk dalam kategori hudud, seperti zina, menuduh zina, mencuri, atau membegal,

⁹ Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz 11, hlm. 170

¹⁰ Ibnu Mundzir, *Al-Ijma'*, hlm. 132, lihat juga Ibnu Hazm, *Maratibul Ijma'*, hlm. 210

¹¹ Ali bin Nayyif Al Syahud, *Al-Khulashah fi Ahkam Ahli Al-Dzimmah wa Al Musta'manin*, hlm. 36.

maka dia dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan untuk kejahatan-kejahatan tersebut, keadaan mereka dalam hal itu sama dengan keadaan orang-orang Islam".

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah menjelaskan secara terperinci dalam Kitabnya "Ahkam Ahli Al-Dzimmah", bahwa mayoritas ulama, yaitu Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa, apabila seseorang dari *ahli dzimmah* melakukan penodaan terhadap agama Islam, maka batal perjanjiannya sebagai warga negara dan pantas dikenai hukuman mati.¹² Akan tetapi, perlu dipahami di sini bahwa yang berhak memvonis hukuman mati hanyalah *Khalifah* atau wakilnya dalam negara *Khilafah*, hal itu pun setelah dilakukan proses pembuktian di peradilan dan peradilan meminta terpidana untuk bertaubat atau masuk Islam kembali, namun terpidana tidak mau bertaubat.¹³

Beberapa pendapat lain, dalam hukum pidana Islam penodaan agama merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan perusakan akidah, yang diancam dosa besar (bagi pelakunya) karena hal ini bertentangan dengan norma agama Islam. Dalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara khusus tentang penodaan terhadap agama, namun hal ini dapat dikategorikan kedalam *jarīmah hudud (riddah)*.¹⁴ Dilihat dari definisinya, Riddah (murtad) adalah keluar dari agama Islam, dan bukan dari agama yang lain. Hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati, karena ia telah menentang agama Islam, padahal, Islamlah yang telah menjadi pondasi tatanan masyarakat muslim. Apabila menganggap ringan kejahatan ini, Syaikh Islam dan Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa usaha melakukan kerusakan di muka bumi dengan cara menyebarkan kekufuran dan

¹² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahlidz Dzimmah*, hlm. 1356-1376

¹³ *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*, Juz XXII, hlm. 194.

¹⁴ Sa'id Hawwa, 2002, *Al Islam, Al I'tishom*, Jakarta, hlm. 415-416.

keraguan terhadap agama Islam adalah lebih berat daripada melakukan kerusakan dengan cara mengambil harta benda, dan menumpahkan darah.¹⁵

Hampir semua kitab fikih mengarah kepada satu pemberian adanya sanksi bunuh terhadap pelaku riddah jika pelakunya adalah berjenis kelamin laki-laki dan memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu berakal dan tidak dipaksa. Sementara jika pelakunya adalah perempuan, dalam pandangan madzhab *Maliki*, *Syafi'i*, dan *Hanbali*, mereka tetap juga dieksekusi, sedangkan menurut madzhab *Hanafi* dan *Shi'ah*, ia hanya dipenjara sampai bertaubat dan menyesali perbuatannya serta kembali kepada Islam. Alasannya, perempuan secara politik tidak berbahaya. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* juga dijelaskan bahwa dalam perjalannya, konsep *riddah* mengalami perluasan makna. Pada mulanya, *riddah* adalah keluar dari Islam menuju kepada kekafiran, kemudian berkembang kepada segala perbuatan berupa pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Islam, atau penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, bahkan pandangan-pandangan yang keras terhadap Islam, dianggap sebagai kesesatan dan dinyatakan sebagai *riddah*, dan pelakunya disebut *murtad*.¹⁶

Pemberian sanksi bunuh terhadap perbuatan penodaan agama atau *murtad* harus jelas motif dan sebabnya, alasan di tentukan sebagai sanksi *murtad* yaitu:

1. Dalil masalah hukuman hudud, mati/bunuh harus *qath'i*. Penetapan hukuman hudud (hukuman mati termasuk hudud) haruslah didasarkan pada ketentuan *nash* (teks rujukan) yang *qath'i* (bersifat pasti), baik dalam hal pengertian yang dikandungnya (*qath'iyyu*

¹⁵Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Robbani Pres, Jakarta, 2008, hlm. 189.

¹⁶Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Toga Putera, t.t.), III: 77 dan dirangkum oleh Abd al-Karim Zaydan, *al-Uqubah fi ash-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Mu'assasahar-Risalah, 1988), 34.

al-dalalah) maupun dalam hal rangkaian sanad/rantai transmisinya (qath'iyyu al-wurud). Dengan demikian, yang memenuhi kedua kriteria tersebut adalah Al-Qur'an dan Hadits mutawatir (*hadīs* yang diriwayatkan oleh puluhan orang dalam setiap mata rantai transmisinya).

2. Hadits tentang hukuman mati terhadap orang murtad sejatinya termasuk dalam kategori hadits ahad (*hadīs* yang diriwayatkan hanya oleh satu atau segelintir orang saja), dan bukan mutawatir. Sementara hukuman hudud semestinya dengan dalil yang qath'I bukan dzanni.
3. Klaim bahwa kaum murtad harus dibunuh karena kemurtadannya jelas bertentangan dengan sejumlah ayat Al-Qur'an tentang orang murtad (seperti Q.S Ali-Imran:90, Q.S. An-Nisa:137, dan Q.S. Al-Baqarah:217). Ayat-ayat ini memang menegaskan bahwa perbuatan murtad adalah suatu dosa yang serius, dan orang murtad akan dihukum Allah di akhirat. Tapi ayat-ayat tersebut sama sekali tidak menyinggung adanya hukuman mati di dunia untuk mereka.
4. Tindakan murtad semata tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi hukuman mati. Faktor utama yang menjadi penentu hukuman ini adalah adanya agresi dan permusuhan pelaku murtad terhadap kaum beriman, dan kebutuhan untuk menjaga kemungkinan munculnya penghasutan melawan agama dan negara. Kesimpulan ini didasarkan pada banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang paksaan dalam beragama. Ibnu Jauzi dari hadits Daruquthni, Abu Bakar Ash-Shiddiq juga pernah membunuh seorang wanita yang

murtad setelah masuk Islam, wanita itu bernama Ummu Qirfah.¹⁷

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Jabir r.a. bahwa seseorang perempuan yang dikenal dengan nama Ummu Qirfah telah murtad. Nabi SAW lalu memerintahkan agar ditawarkan Islam kepadanya. Jika mau bertaubat, dia dibiarkan. Tetapi jika tidak mau, dia dibunuh. Adapun dasar dari orang yang murtad itu diminta bertaubat adalah dari perkataan Umar tentang seorang murtad yang dibunuh dan tidak diundurkan pembunuhaninya, “*Apakah kalian tidak memenjarakannya selama tiga hari, memberinya makan roti setiap hari, dan memintanya agar bertaubat sehingga diharapkan dia bertaubat dan kembali kepada Allah?*”. Kemudian Umar berkata, “*Ya Allah, saya tidak hadir dan tidak memerintahkan. Saya akan ridha jika berita ini sampai kepadaku*”. Al Qadhi Iyadh menuturkan, bahwa ini telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama dan para imam ahli fatwa, mulai dari generasi sahabat dan seterusnya. Ibn Mundzir menyatakan, bahwa mayoritas ahli ilmu sepakat tentang sanksi bagi orang yang menghina Nabi SAW adalah hukuman mati. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam al-Laits, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawih dan Imam as-Syafii. Hal senada juga dinyatakan oleh Kholil Ibn Ishaq al-Jundi, ulama besar madzhab Maliki, “*Siapa saja yang mencela Nabi, melaknat, mengejek, menuduh, merendahkan, melabeli dengan sifat yang bukan sifatnya, menyebutkan kekurangan pada diri dan karakternya, merasa iri karena ketinggian martabat, ilmu dan kezuhudannya*,

¹⁷Muhammad Dahri “*Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam*”, dalam *at-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017 hlm. 61-64.

*menisbatkan hal-hal yang tidak pantas kepadaanya, dan mencela. Maka hukumannya adalah dibunuh”.*¹⁸

Dalil lain dalam perkara ini adalah kasus pembunuhan Asma' binti Marwan, seorang wanita Yahudi yang amat membenci Islam dan kerap menghina Rasulullah. 'Umayr bin Adi, salah seorang sahabat Nabi yang mendatangi rumah Asma' lalu membunuhnya. Dalam kejadian tersebut Rasulullah mendiamkannya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman bunuh itu dilakukan dengan izin dari Rasulullah dalam kapasitas baginda Rasulullah sebagai ketua negara Islam. Imam Al-Khatthabi menyatakan, *”Saya tidak tahu ada seorang (ulama) kaum Muslim yang berbeda pendapat tentang wajibnya hukuman mati (bagi pencela Rasulullah SAW)”*. Menurut Ibnu Baththal, para ulama berselisih pendapat mengenai siapa pelaku atau oknumnya. Jika ia adalah kafir ahlul ahdi atau ahlu dzimmah, maka menurut pendapat Ibnu Qasim yang dikutip dari Imam Malik orang tersebut wajib dibunuh setelah diminta untuk masuk Islam terlebih dahulu. Akan tetapi jika yang mencaci maki Nabi SAW adalah orang muslim sendiri, maka ia harus dibunuh tanpa memintanya untuk bertaubat terlebih dahulu. Ibnu Al-Mundziri juga mengutip pendapat dari Al-Latsi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Ishak yang menyatakan, bahwa orang yahudi juga diperlakukan sama seperti orang muslim apabila dia mencaci maki Nabi SAW. Ibn Taimiyah, dalam bukunya As-Sharim al-Maslul 'ala Syatimiari-Rasul, telah menjelaskan tindakan orang yang menghujat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kata-kata yang bertujuan meremehkan dan merendahkan martabatnya, sebagaimana dipahami kebanyakan orang, terlepas perbedaan akidah

¹⁸Muhammad Dahri *“Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam”*, dalam at-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017 hlm. 61-64.

mereka, termasuk melaknat dan menjelek-jelekkan maka dia di bunuh.¹⁹

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Kholil ibn Ishaq al-Junaidy, (madzhab Maliki), “Siapa saja mencela Nabi, melaknat, mengejek, menuduh, merendahkan, melabeli dengan sifat yang bukan sifatnya, menyebutkan kekurangan pada diri dan karakternya, merasa iri karena ketinggian martabat, ilmu dan kedzuhudannya, menisbatkan hal-hal yang tidak pantas kepadanya, dan mencela, maka hukumannya adalah dibunuh”. Di samping itu, Ibnu Qudamah Al Maqdisi berkata. “Barangsiapa yang menghina Allah maka dia telah kafir, baik dalam keadaan bercanda ataupun sungguhan (serius), begitu pula menghina Allah secara langsung, atau dengan ayat-ayat-Nya, rasul-rasul-Nya dan kitab-kitab-Nya. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Barang siapa mengucapkan perkataan keji dan kata-kata yang berisi penghinaan terhadap keagungan Allah dan kemuliaan-Nya atau melecehkan dari perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah, atau menyamakan kata-kata untuk makhluk yang sebenarnya hanya layak ditujukan untuk Allah tanpa bermaksud kufur dan melecehkan, atau tanpa sengaja melakukan penyimpangan, jika hal itu berulang kali dilakukannya, menunjukan sikapnya yang mempermainkan agama, pelecehannya terhadap kehormatan/keagungan Allah dan kejahilannya terhadap keagungan dan kebesaran-Nya, maka tanpa ada keraguan lagi, hukumnya kafir”. Dan As-Sa’di berkata: “menghina Allah dan Rasul-Nya adalah kafir keluar dari (agama), karena dasar agama terbangun atas pengagungan terhadap Allah, agama, dan rasul-Nya. Sementara Istihza’ akan

¹⁹Muhammad Dahri “*Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam*”, dalam *at-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017 hlm. 61-64.

menghilangkan dasar keimanan dan membatalkannya". Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Setiap orang yang menghina Nabi Muhammad dan mengejek beliau baik muslim ataupun kafir maka dia wajib dibunuh dan saya berpendapat dia dibunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat".²⁰

Dalam *nash-nash* Al- Qur'an dan As-Sunnah serta perkataan para ulama ummat telah menunjukkan dengan jelas dan pasti bahwa orang yang mencaci Allah dan agama adalah kafir dan murtad, keluar dari agama Islam. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 12:²¹

فَقَاتِلُوا دِينُكُمْ فِي وَطَعْنُوا عَهْدِهِمْ بَعْدِ مِنْ اِيمَانِهِمْ نَكْثُوا وَإِنْ
يَنْتَهُوْنَ لَعْلَهُمْ لَآِيمَانَ لَا إِيمَانُ الْكُفَّارِ أَيْمَانَ

"Jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan agamamu, perangilah para pemimpin kekufturan itu karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang sumpahnya supaya mereka berhenti (dari kekufturan dan penganiayaan)."

Dalam Surah At-Taubah ayat 65-66 Allah berfirman:²²

وَلِئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَحْوُضُ وَلَنَعْبُطْ قُلْ أَبِاللَّهِ
وَأَيْتَهِ وَرَسُولِهِ كُنُشْ تَسْتَهْزِئُونَ ٦٥

²⁰Muhammad Dahri "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam", dalam *at-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017 hlm. 61-64

²¹Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Syamil, Bandung, hlm.188.

²²Departemen Agama RI, 2005, *Al - Qur'an dan Terjemahan*, Syamil, Bandung, hlm.197.

لَا تَعْنَتِرُوا فَدْكَرْمُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ تَغْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ
نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِإِنْكُمْ كَانُوا بِخُرْمِينَ ٦٦

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, “Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?. Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (lantaran telah bertaubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adaalah orang-orang yang berbuat dosa”.

Hadits Rasulullah yang diceritakan Ibnu Abbas sebagai berikut: *Terjemahnya: “Dari Ibnu Abbas R.a (ia menceritakan) tentang orang buta. Ibu kandungnya adalah seorang wanita hamba sahaya yang melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Meskipun telah dilarang, wanita tersebut tidak menghentikan perbuatannya. Dan pada suatu malam, anaknya yang buta itu mengambil semacam benda pegangan lalu meletakkannya di perut wanita itu, dan sambil bertumpu pada benda itu, dia bunuh wanita tersebut. Sementara itu, Rasulullah datang (menyaksikannya) lalu beliau bersabda: Lihatlah, wanita itu telah halal darahnya. (H.R Abu Dawud)”*.

Berdasarkan dalil-dalil inilah kemudian para fuqaha menetapkan bahwa penodaan agama termasuk dalam tindak pidana (*jarimah* hudud) dan sanksinya berupa hukuman mati. Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan nash, syariat islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkannya kepada imam (penguasa).

Adapun penodaan agama dalam kategori yang lain, mungkin bisa dimasukkan dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, sehingga diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada para hakim untuk memutuskan perkara dengan berijtihad berdasarkan berbagai macam pertimbangan, juga dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di zaman sekarang. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa tindakan penodaan agama dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendekatkan kepada perilaku murtad bagi seorang muslim. Pengkategorian tersebut dapat didasari dari bentuk atau jenis perbuatan penodaan agamanya, karena perbuatan penodaan agama berkembang menjadi berbagai macam jenisnya, yang perlu diperhatikan adalah apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari perilaku murtad (*riddah*) atau tidak. Ajaran hukum pidana Islam dikenal dalam ilmu syariah disebut dengan istilah jinayah atau *jarīmah*. Sebagian fuqaha (ahli syariah) membedakan antara *jarīmah* dan jinayah. *Jarīmah* diartikan pada semua jenis pelanggaran pidana Islam. Sedangkan jinayah hanya untuk pelanggaran atau pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan saja.²³ Dalam *jarīmah*, menggolongkan tindak pidana yang dilihat dari berat ringannya hukuman menjadi tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zīr*. Oleh karena itu, yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana (*jarīmah*) apabila suatu perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah*. Dalam hal ini seseorang yang melakukan penghinaan atau penodaan terhadap agama dikenai dengan *Jarīmah ta'zīr* yakni secara etimologis artinya adalah menolak atau mencegah, sedangkan secara terminologis adalah hukuman yang kadar ukurannya tidak disebutkan oleh *syara'* (hukum

²³Syukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk, 2007, *Syariah Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC, hlm. 89-90.

Islam) dan hal ini sepenuhnya dibebankan kepada suatu pengusasa/hakim.²⁴

Ta'zīr adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, tidak sebagaimana halnya *had* yang sudah ditentukan hukumannya. Namun, terkait dengan *ta'zīr*, *syara'* memberikan keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk dan ukuran hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera, tentunya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi orang yang bersangkutan, termasuk memperhatikan juga waktu dan perkembangan zaman.²⁵

Menurut analisis penulis penodaan agama yang dilakukan Lina Lutfia alias Lili alias Lina Mukherjee binti Abdul Mukhit dilihat dari hukum pidana islam termasuk dalam bentuk *jarīmah ta'zīr*. *Ta'zīr* disini adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi *syara'* memberikan keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera, dengan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, waktu dan perkembangan yang ada.²⁶

²⁴ A. Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. 1, hlm. 13.

²⁵ Muhammad Syarif "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)", Nizam: Jurnalis lampedia Volume: 2 Nomor 1 hlm. 8.

²⁶ Wahbah zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Katam, dkk Fiqh Islam 7 hlm. 259.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagaimana jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial yang dilakukan oleh Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee Binti Abdul Mukhit melalui media sosial menurut Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang memberikan sanksi berupa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan.
2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media sosial yang dilakukan oleh Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee Binti Abdul Mukhit menurut Hukum Pidana Islam yaitu dapat dimasukkan dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, sehingga diberikan kesempatan dan keleluasaan

kepada para hakim untuk memutuskan perkara dengan berijtihad berdasarkan berbagai macam pertimbangan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di zaman sekarang. Dengan demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa tindakan penodaan agama dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendekatkan kepada perilaku murtad bagi seorang muslim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka berikut saran-saran yang dapat dijadikan masukan kedepan, diantaranya adalah sebagai:

1. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum bagi pelaku penodaan agama, sebab apabila pelaku tidak di tindak lanjuti maka tidak akan menimbulkan efek jera dan memungkinkan seseorang melakukan penodaan agama tanpa ada rasa takut.
2. Perlu adanya Rancangan Undang-Undang yang menyangkut batasan-batasan seseorang untuk dikenakan sanksi penodaan agama dan sebagai penguat Undang-Undang yang ada sehingga dapat menyesuaikan perkembangan zaman sekarang.
3. Untuk masyarakat yang mendapati seseorang terindikasi melakukan tindak pidana penodaan agama segera melapor kepada pihak yang berwenang dengan alat bukti yang jelas dengan tidak melakukan main hakim sendiri, sehingga tidak menimbulkan masalah kegaduhan di dalam suatu masyarakat.

C. Penutup

Maha Suci Allah, berkat mengaruniai hamba-hamba-Nya dengan akal-budi dan hati pikiran. Dengan itulah manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya. Dengan itu pula, manusia dipandang sebagai makhluk

terpuji. Dengan segala keterbatasan penulis menyadari betapa banyaknya terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapatkan masukan demi kebaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- A. Wardi Muslich.. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- Al Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Robbani Pres 2008.
- Alal, Al-Fasi. *Maqasid ash-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Cassablanca: Maktabah al-Wihdah al-Arabiyyah.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. "Hukm al-Murtad fi al-Islam." *Jaridah al-Ittihad*. 2007
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal)*. ITS Press: Surabaya 2009.
- Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahan*, Syamil, Bandung, 2005.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, dan Kamilatun. *Pengantar Hukum Siber*. Kotabumi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2019.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hawwa, Sa'id. *Al Islam, Al I'tishom*. Jakarta 2002.
- Kamali, Moh. Hasyim. *Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments*. Kuala Lumpur: Islamic Publisher, 2000.
- Kamali, Moh. Hasyim. *Punishment in Islamic Law, an Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 1995.

- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Little, David, John Kelsey, Abdul Aziz A. Sachedina, dan diterjemahkan oleh Riyanto. *Kebebasan Agama dan HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya
- Munajat, Makhrus. *Fiqh Jinayah: Norma-Norma Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Syariah Press, 2008.
- Muslich, A. Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nabhan, Muhammad Faruq. *Al-Madkhal li al-Tasyri’I al-Islami*. Beirut: Dar al-Qolam, 1981.
- Praja, Juhaya S., dan Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2000.
- Pulton, dkk. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*. Jakarta: ILRC, 2012.
- Qomar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2013.
- raja, Juhaya S., dkk. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1982.
- Rohidin, *Kontruksi Baru Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: FH UII Press, Cet. 1, 2015
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Toha Putera, t.t.), III: 77 dan dirangkum oleh Abd al-Karim Zaydan, al-Uqubah fi ash-Shari‘ah al-Islamiyyah, (Kairo: Mu‘assasahar-Risalah) 1988.

S, Arifianto. *Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat*. Jakarta: Media Bangsa, 2013..

Shaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Shari‘ah*. Kairo: Dar ash-Shuruq, Cet. 13, 1997.

Sharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rinek Cipta, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.

Suma, M. Amin, dkk. *Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Syukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk. *Syariah Islam dan HAM*. Jakarta: CSRC 2007.

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika 2000.

Zaydan, Abd al-Karim. *Al-Uqubah fi ash-Shari‘ah al-Islamiyyah*. Kairo: Mu‘assasah ar-Risalah, 1988.

Undang-undang

Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Jurnal/Artikel

- Adare, Randy A. "Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Et Societis*, Vol. I, 2013L
- Adnani, *Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, Al-Qadha*, Vol. 4 No. 1, 2017
- Al Mughoffary, Ibnu Tulaji Ahmad. "Analisis Muatan Materi Pasal Penodaan Agama Dalam Kajian Politik Hukum Pidana." *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang*.
- Amin, Mohammad. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan No. 1787K/Pid/2012." 2016.
- Anggraeny, Kurnia Dewi. "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum." 2017.
- Anggraeny, Kurnia Dewi. "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum." *Volume 2*, 2017.
- Apeldorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Ash-Sharakhs, Hams ad-Din. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.,
- Asif, Muhammad Fadlan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama".
- Azizah, Imroatul. "Sanksi Riddah Perspektif Maqasid al-Shari'ah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundungan Islam* Vol 5, 2015,
- Dkk, Khairani. "Penistaan Agama Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam: Telaah Kasus Mirza Al-Fath." *Jurista*, Vol. 3, 2017.
- Fauzan, M. Andri. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." 2013.
- Ibnu Tulaji Ahmad Al Mughoffary, "Analisis Muatan Materi Pasal Penodaan Agama Dalam Kajian Politik Hukum

Pidana”, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang.

Ismahudi, “Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia”.

Jayatri, Kimdaine Ulima, dan Supanto. “Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penodaan Agama.” *Recidive*, Vol. 5, 2016

Lubis, Muhammad Andri Fauzan. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

Mardika, Andi. “Sanksi *Jari>mah* Riddah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Teori Hifzu Al-Din).” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, 2021.

Maulani, Diah Gustiniati. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia.” 2013.

Muhammad Dahri “*Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam*”, dalam *at-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017.

Muhammad Fadlan Asif “*Analisisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*”.

Muhammad Syarif “*Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)*”, Nizam: Jurnalis lampedia Volume: 2 Nomor 1 .

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Randy A Adare, “*Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*”, ” *Jurnal Lex Et Societis*, (Vol. I/No. 1 Jan-Mrt 2013)

Utama, Andrew Shandy. “Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Media Sosial dan Sanksi Hukumnya.” *Prosiding-Seminar*

Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer (SEMASTER) Vol 1, 2020

Wahyudi, Nopa. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." 2020.

WEB

Adhetyo, Sadiq. "Delik Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Indonesia." Diakses dari <http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada 21 Juni 2024.

Safi, Louay. "Human Rights and Islamic Legal Reform." Diakses dari <http://home.att.net/~l.safi/articles/1999human.html>.

LAMPIRAN

A. Lembar Putusan

		Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id	Pd.J.A.3
---	---	---	----------

PUTUSAN
Nomor 726/Pd.Sus/2023/PN.Plg

DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mempidi perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lina Lutfawati Alias Lili Alias Lina Mukherjee**

Binti Abdul Mukhit;

2. Tempat lahir : Bayuwangi;

3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /10 Mei 1990;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Menteng Alas No. 10 RT. 6 RW. 5 Kelurahan

Menteng Aras Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta

Selatan Provinsi DKI Jakarta

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Lina Lutfawati Alias Lili Alias Lina Mukherjee Binti Abdul

Mukhit ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPK/Pn.269/WNEs.2/5/2023 ditetapkan;

Terdakwa Lina Lutfawati Alias Lili Alias Lina Mukherjee Binti Abdul

Mukhit diancam dalam tuntutan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29

Juli 2023;

3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan

tanggal 12 Agustus 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Perwakilan Hukumnya yaitu: st. Supendi, S.H.

M.H, M. Nur Fitria, S.H., M.H, Advokat dan Pengacara dari Kamizir Hukum

Supendi, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT. 099

RW. 012 Kelurahan Lorok Paku Kecamatan Idr Barat I Palembang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didakwa di

Kesepakitan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Juli 2023 dalam

register Nomor 1215 / SK 2023/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor

726/Pd.Sus/2023/PN.Plg tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pd.Sus/2023/PN.Plg tanggal 14

Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 726/Pd.Sus/2023/PN.Plg

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat oleh Apotek Rakyat Palembang dan tidak dimaksudkan untuk memberikan informasi pengobatan. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. Boleh dipergunakan untuk tujuan ilmiah, selama tidak diubah konten dan diketahui oleh pengguna. Terimakasih atas penggunaan yang benar.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Sakai-saksi, keterangan para Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang disajikan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan surtutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Mengajukan terdakwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE BINTI ABDUL MUKHIT bersalah melakukan tindak pidana paksanadangan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dibujuk untuk meningkatkan nasa kebenaran individu dan kelompok misyaknya terdakwa berdasarkan atas "agama" sebagaimana ditar dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjeruhi pidana penjara terhadap terdakwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE (BINTI) ABDUL MUKHIT selama 2 (DUA) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Verex;
Dikemas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor HP 085691200801;
 - 1 (satu) buah sim tiktok @lukmanukir link <https://www.tiktok.com/@lukmanukir>
 - 1 (satu) Unit handphone Jenis Iphone 14 Pro Max Warna Purple (Ungu);
Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / Pidato Penzelar Hukum Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa dibebaskan dengan alasan pasal yang dilakukannya kepada Terdakwa telah dicatul oleh KUHPtana yang baru. Telan pula mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku perbuatannya dan merasa bersalah serta Terdakwa menyatakan dapat mungkin dapat meminta maaf kepada Masyarakat Indonesia khususnya beragama Islam atas perbuatannya namun Terdakwa telah menuntut maaf melalui berbagai media selama persidangan, Terdakwa juga berjargat tidak akan mendulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pemberlakuan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Permoholes Terdakwa tersebut diperintahkan Penuntut Umum menggapanya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya sebagaimana atas tanggapannya Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pemberlakuan / pledoi dan permoholesnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilaporkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dilakukan berdasarkan surat dakteran sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LIEU ALIAS LINA MUKHERJEE BINTI ABDUL MUKHIT, pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di sekitar Bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Jalan Inspektor Marzuki Kelurahan Sungai Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang atau akun tiktok @linamukherjee alamat link <https://www.tiktok.com/@linamukherjee/video/7208429147910488810> atau akun youtube @linamukherjee alamat link <https://www.youtube.com/shorts/J9KIVemAz> atau sebaliknya disusul tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan tanpa hati menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permuasan individu dan/atau kelompok mayarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa bersama dengan asistennya berkata, "Yok cobain kruk babi" dan dengan sengaja mendatangi Rumah Makan Babi Guling Sisir Tukad yang beralamat di Jalan Sri Rama No. 8 Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali itu saat makanan kruk babi telah disajikan, terdakwa pun menyuruh Asistennya untuk merekam video terdakwa makan kruk babi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone jenis iPhone 14 Pro Max Warna Purple (Ungu) kemudian menyebarkan video tersebut dengan cara terdakwa memposting video makan kruk Babi ke akun tiktok @linamukherjee alamat link <https://www.tiktok.com/@linamukherjee/video/7205129147910488810> dengan durasi 1:40 (satu menit empat puluh detik) yang kemudian ditonton oleh 4,5 juta penonton dan akun youtube @linamukherjee alamat link <https://www.youtube.com/shorts/J9KIVemAz> yang kemudian ditonton oleh 420.901 penonton;

Halaman 3 dari 39 Putusan Akhir T20Pdt.Sus/2023/PN/Pg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sahabat Syaif Hidayat Bin Syamsudin melaku warganet melihat konten video yang disebarluaskan yang mana terdapat makan kruk babi sambil bicara dengan kalimat sebagai berikut : "Bismillah, eh lupa, guys, Hadi ini' aku karyaknya dipecah dan kamu keluarga karena aku penasaran banger sama yang namanya Kruk babi ya, jadi namu ini nukum ikan udang aku lengger usah pasti di kantin kelenggatu dipecah lalu aku cuma penasaran karena di nikol ku banyak kruk yeah, nih kruk makak kruk babi aku minyakin ya, kemarin makan dipecahnya banget aja, kasi itu udah berapa kali makan babi ? rotinya tiga kali ya, pertama di sri lanka, waktu itu aku ga sempat makan, aku ga bisa banget ingat pol pol itu kan, aku pilin pork itu repot pok pok pok jadi waktu usahku masih diulat puluh empat tonun, harus abis makan babi aku tanya sama ini nih kan, eh mengidolamain ?? gini gaya makan yang masih udah makan (terawa). Terus yang ketiga ini dengan kesadaran diri yaa. Cuma pengen rasaan kasi apa sih rasanya, kruk babi yang rame di... Ya akan dipecah ini dari kantin kelenggatu, kok rasanya kayak ini yaa, kruk babi kayak dapur seperti yang diliur yang ketika ga seennak orang yang cerita di nikol isti aku ya, kruk aku biaya, ya alih takut nahi yang mesuk pun kesemua ni keluargaku. Mawarkan aku ya cuma konten kruk".

Bahwa sebenarnya nonon video terdakwa tersebut, sahabat Syaif Hidayat Bin Syamsudin merasa tidak suka, benci dan mengecam video terdakwa yang sudah menistakan ajaran Islam dengan menyebut kata Bismillah, Ya Allah disaat terdakwa makan kruk babi dan reaksi yang sama juga diarsakan oleh warganet lain yang menonton video makan kruk babi terdakwa diantarnya sahabat Martinaudi Binti H. Basarudin, sahabat Husyam Bin Usman, sahabat Zakiashri Bin Jaamani, dan sahabat Sapiardi Bin Syamsudin yang merasa benci, resah dan merasa agamanya telah dinisbatkan kemudian sahabat Sapiardi Bin Syamsudin menghubungi sahabat KH. Khofif Ayyari selaku Ulama meminta pendapat tentang video makan kruk babi terdakwa yang mana sahabat KH. Khofif Ayyari memperbaikan bahwa konten makan kruk babi yang dibuat terdakwa merupakan bentuk menyimpulkan agama Allah dengan cara mengungkapkan video tersebut pada media sosial sehingga bagi orang lain yang tidak memiliki keimanan akan menganggap orang dan diwali kehidupan bermegara pun hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap sifat yang pertama selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sahabat Syaif Hidayat melaporkan perbuatan terdakwa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 726/Pdt.Sus/2023/M/W/Py



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa video makan krik babi terdakwa mendapat reaksi komentar dari warganet ada yang pro dan ada juga yang konta dengan beragam komentar saling paduh, saling serang diantara warganet yang Pro dan Konta berakibat memunculkan rasa kebencian dan rasa permusuhan di kalangan warganet yang resah dan tidak suka dengan video makan krik babi yang diposting oleh terdakwa bahkan ada sebagian warganet mengingatkan terdakwa jika tidak pantas terdakwa yang jelas beragama Islam dan seorang muslimah memposting dirinya makan krik babi yang dilarang dalam *aqidah* Islam namun komentar dan nashat dari warganet di video makan krik babi ditanggapi dengan kesal oleh terdakwa yang merasa tidak salah karena telah memposting video terdakwa makan krik babi di saran langsung pada akun tidak @harmekteri alamat [link](https://www.tiktok.com/@harmekteri/video/720643917015889810) sehingga membius warganet semakin gerah dan tidak nyaman terhadap sikap terdakwa tersebut, hanya demi komen rela mengorbankan agamanya dan perbuatan terdakwa dapat diambil, ditulsi oleh anak-anak generasi muda Islam yang jika ingin terkena cukup melakukan pertubuhan yang dianggap agama agie video jadi viral di dunia maya;

Bahwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 03/MUI-SS/W/2023 tanggal 12 April 2023, yang dijelaskan pada oleh saisi Dr. Nurkhaliq, M.Ag sebagai Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan didalam video makan krik babi diwajib menyebut *kafir bermakna* disandangkan dengan bawang yang haram, itu masuk dalam kategori merendahkan, menghina dan menista agama Islam;

Bahwa menurut Ahli Assoc. Prof. Dr. Antikus Duhra Bachar, S.Pd., S.H., M.Hum selaku Ahli Bahasa berpendapat bahwa dalam pandangan tidak surut bahwa tindakan terdakwa dalam video makan krik babi terdakwa tersebut mengandung dua dimensi. Pertama, tindakan tersebut akan pada direspon dengan sikap permusuhan dan kebencian oleh pemeluk agama Islam karena kesakralan nama Allah digunakan untuk mengawali sesuatu yang tergolong sebagai dosa besar perspektif agama Islam. Kedua, tindakan tersebut tergolong sebagai tindakan yang merendahkan ajaran agama Islam karena terdakwa dalam video tersebut, secara sadar, melakukan tindakan yang tergolong sebagai dosa besar di depan publik dan dengan maksud untuk disibukkan oleh terdakwa;

Bahwa menurut Ahli DR. Tribus Rahardiansah, P., S.H., M.H., M.Si selaku Ahli Sosialigi berpendapat video makan krik babi terdakwa merupakan

Halaman 5 dari 30 Putusan Minor 226/Pdt.Sus/2023/PW/Pg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Tindakan komunikasi menyampaikan rasa benci atau sebercakar, penghinian, penistaan, pelecehan agama, permasuhan, provokasi, menghina dan mengadu domba yang dapat menggelembungkan orang lain, individu, dan atau kelompok untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kalimat-kalimat tersebut dibuatkan untuk menimbulkan permasuhan dan kebencian individu dan atau kelompok di masyarakat yang beragama Islam dan secara sengaja terdapat di akun [illuminej1](https://www.tiktok.com/@illuminej1) tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permasuhan antara individu dan atau kelompok masyarakat tersebut berdasarkan atas suku, agama, ras, dan atau golongan (SARA).

Bahwa menurut Ahli Dr. Sri Sulastri, S.H, M.Hum sejauh Ahli Pidana berpendapat jika perbuatan terdakwa yang mengulangi kalimat 'Salam' sebelum memakan ikan batik jioa dilihat dari perspektif sosial dan hukum merupakan interaksi sosial yang berarti protokol dimana terdakwa secara sengaja menyampaikan kata bismillah yang dibuatkan untuk merendahkan, melecehkan, dan menista agama Islam. Adanya salam bismillah membuatkan bahwa pelaku jelas berbuat untuk menggerakkan orang lain, individu dan atau kelompok untuk saling bersikeras tak sesama umat Islam maupun masyarakat pemeluk agama lain. Ahli juga menjelaskan dampak dari adanya video memakan ikan batik tersebut di masyarakat yaitu Mendorong permasuhan dan kebencian atas nama agama, munculnya perilaku anarkis dalam masyarakat, pelanggaran HAM, selakuan di masyarakat atas nama agama dan Menciptakan terjadinya perlakuan diskriminasi, penghinaan nyata orang lain atas nama perbedaan, timbulnya konflik kekerasan dan membahayakan NKRI dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 163/PKR/2023 tanggal 25 Mei 2023 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) Unit handphone Jems iPhone 14 Pro Max Warna Purple (Ungu) milik tersangka item bukti 2 (dua) buah video file yang memperlihatkan momen terdakwa sedang duduk menghadap meja dan memakan ikan batik;

Perbuatan terdakwa diatur dan dianggap pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/WH/PU/2023/14 Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memimpang, bahwa atas dugaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Perwakil Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dugaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/kecusus;

Memimpang, bahwa untuk membuktikan dugaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Syarif Hidayat Bin Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi dalam kesaduan sebel jasmani dan iphant;

Bahwa saksi memberikan BAP saksi dalam berkas perkara;

Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar puluh 18.00 Wib, ketika saksi menerima video yang mana di dalam video tersebut terdakwa sedang memakan kruk babi, karena masih merasa perasaan sehingga saksi langsung membuka ikur stok @rumukerji dan saksi melihat video makan kruk babi tersebut sampai dengan selesai;

Bahwa saksi bersama saksi Sapri berdiskusi lalu keduanya sepakat untuk menghubungi saksi Khabir Asy'ari selaku guru saksi saat di pesantren yang mana saksi Sapri meminta saran terkait video yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi Khabir Asy'ari mengatakan jika konten yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam penistaan agama sejauh itu saksi Khabir Asy'ari memberi nasihat "Pesan Rasulullah kesia kalian melihat kemungkaran maka ada tiga cara untuk menegurinya yakni pertama dengan tanganmu, kedua dengan isian mu dan ketiga dengan hatimu, dan dalam hal tersebut gunakanlah tangan kalian" sebenarnya ini mitra uli amri dan uli amri itu adalah pemerintah dan pemerintah memiliki polisi dan yang berwenang itu adalah polisi maka dari itu silahkan kalian laporan;

Bahwa benar dengan adanya video makan kruk babi yang dilakukan terdakwa tersebut memerlukan pemersilahan antara nizan yang beragama non muslim yang tidak masalah jika seseorang memakan daging babi tersebut sedangkan untuk nizan yang beragama muslim tidak senju dikarenakan daging babi sudah jelas Haram dalam kitab Al-Qur'an namun terdakwa yang bersifat agama muslim tetap memakannya hal tersebut dinilai jika terdakwa telah merendahkan agama Allah sehingga

Halaman 7 dari 39 Putusan Admnr 709/Pdt.Sus/2023/PN/Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

imbuan pro dan kontra dalam dunia maya sehingga menambah kesaksian saksi untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke PGDA SUMSEL.

Bahwa perasaan saksi saat melihat video terdakwa tersebut saksi merasa benci dan marah karena terdakwa memakan krik babi dengan mengucapkan kata-kata "Bismillah, eh kupa guys. Hari ini aku kasyurek dipesat dari hari keluar karena aku penasaran banget sama yang namanya krik babi ye, jadi hari ini rukun iman udah aku inggar udah pasti di kamu keluaraku dicabut tapi aku cuma penasaran karena di sitok ku banyak krik yah" hal tersebut telah terbukti jika terdakwa dalam keadaan sadar dan sengaja menyandarkan nama Allah dengan sesuatu yang diharamkan.

Bahwa sebelumnya saksi telah menunggu permintaan Maaf dari terdakwa namun terdakwa tetep tidak meminta maaf malah terdakwa masih meminta maaf dengan membuat video lain yang malah menantang sehingga saksi merasa jika terdakwa tidak menyadari kesalahannya dan merasa sombong dengan apa yang dilakukannya;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugihndi Bin Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara;
- Berwita pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, terpia sengaja saksi melihat sebuah video makan krik babi yang baru diketahui orang yang ada di video tersebut adalah terdakwa, awalnya saksi cuci dan tidak terlalu memperhatikan isi video tersebut namun saksi melihat penontonnya sudah ratusan ribu dan kimentarinya sudah dua puluh enam ribu terdapat berbagai komentar pro dan kontra pada kolom komentar sehingga saksi pun ikut memerion video sampai akhir dan saksi merilah bahwa video makan babi tersebut sengaja dibuat dan turukken terdakwa ke media sosial yang dibuktikan dengan mengucapkan kata-kata " Saya sadar, dikeluaran dari ik, dimulai dengan asma aliah dan ditutup ini hanya konten sambil mensanjukan jempol ";

Asisten II dan 39 Putusan Nomor 726/Pd. Sur/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

· Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, saksi berdiskusi dengan saksi Syaiful Hidayat yang mana saksi meminta persepsi saksi syaiful hidayat untuk menghitung saksi Khabir Asy'ari selaku guru saksi syaiful hidayat saat di pesantren dan ku kemudian saksi syaiful hidayat pun menyetujunya selanjutnya saksi menghitung saksi Khabir Asy'ari dan meminta saran terkait video makan babi yang diupload oleh terdakwa ke media sosial milik terdakwa, saat itu saksi Khabir Asy'ari mengatakan jika keterangan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam penilaian agama sebenarnya saksi Khabir Asy'ari memberi nasehat 'Pesan Rasulullah ketika kalian melihat kemungkiran maka ada tiga cara untuk menegurnya yakni pertama dengan tanganmu, kedua dengan lisannya dan ketiga dengan hatimu, dan dalam hal tersebut gunakanlah tangan kalian' karena ini mitra utama dan off amni itu adalah pemerintah dan pemerintah memiliki polisi dan yang benar-benar itu adalah polisi maka dari itu silahkan kalian laporan;

· Bahwa banyak netizen yang beragama muslim sangat tidak setuju dari merasa benci dengan konten makan babi yang dibuat dan diupload oleh terdakwa. Karena video itu dengung telah mencampuri adukku antara akidah dan komen apalogi di dalam video tersebut terdakwa melafazkan kata "zismilah" yang diandungkai dengan makarim yang tidak halal;

· Bahwa terdakwa dengan sengaja melafazkan kata "zismilah" selain itu terdakwa juga mengatakan "jadi hari ini rukun rman udah atau langgar udah pasti di kartu keluargaku dicabut" hal tersebut membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam video memukau kritik babi yang dilakukan oleh terdakwa yang mana video tersebut terdakwa diupload pada akun tiktok @lina mukerjee miliknya sehingga menurut kami hal tersebut masuk dalam penistaan agama Islam;

· Bahwa saksi telah memonton video makan babi yang terdakwa upload sampai dengan selesai yang mana saat itu perasaan saksi sangat marah dan kesal kepada terdakwa karena dengan jelas terdakwa yang berstatus Agama Islam memakan sesuatu yang sifatnya jelas diharamkan di dalam kitab Al-qur'an yang mana perbuatan tersebut terdakwa upload ke media sosial dengan alasan isi hanyalah konten namun saksi yang mendengar serta melihat merasa hal tersebut tidak patut untuk dilakukan apalog dipublikasikan ke dunia maya karena setiap orang dapat melihat atau menonton video yang diupload oleh pemilik akun dan jikalau pun yang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor: 729/Pdt.Sid/2023/PN Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak mengupload ke media sosial maka hal tersebut hanyalah menjadi urusan pribadi terdakwa dengan Allah;

- Bahwa saksi beragama Islam tujuannya adalah Al-Quran sebagai perintah dan krirangan Allah serta petunjuk bagi kami agama Islam dan keterikatannya dengan terdakwa yang memakai krui babi yang disandingkan dengan nama Allah dalam keadaan sadar maka terdakwa telah melencetkan aqidah kami terhadap larangan Allah atau Nas-Nya

Quran tentang halamnya menakan ibu dengan memperosok-ugi alih dan mengajak-jak iman kami maka seharusnya secara hukum Islam dia seharusnya dihukum secara Qisas (hukum cambuk);

- Bahwa setiap orang yang memiliki akun tiktok dapat merontokn semua video yang ada di aplikasi tiktok termasuk anak yang dibawah umur sehingga terhadap konten malian krui tidak tersebut tidaklah pantas untuk diupload ke media sosial dilakukan penonton anak-anak berfikiran bahwa mengkonsumsi babi diperbolehkan bagi muslim sehingga kemungkinan keci dapat ditu dih anak-anak dibawah umur;

- Bahwa sebelumnya saksi telah mengungu permintaan mesaf dari terdakwa namun terdakwa tetep tidak meminta mesaf malah terdakwa masih membuat masalah dengan membuat video lain yang malah menantang sehingga saksi merasa jika terdakwa tidak menyadari kesalahannya dan merasa sombong dengan apa yang dilakukannya;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya beragama Islam;

- Bahwa saksi memberikan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Husyam Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi memberarkan BAP saksi dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan ketuarga dengannya;

- Bahwa bertemu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar puluk 07.57 WIB, saksi melihat di grup whatsapp "SAHABAT HUSYAM" terdapat link berita pada Liputan Palembang Metropolis terkait dengan Kasus Link Mukherjee setelah itu saksi langsung searching di google dan menemukan

Halaman 30 dari 39 Putusan Minor 226/Pdt.Sus/2023/PW/Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

video terdakwa sedang makan babi yang disandingkan dengan lafadz Bismillah;

- Bahwa setelah menonton video terdakwa saksi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh saksi Syarif Hidayat sudah benar karena hal tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap agama Allah;

- Bahwa didalam konten makan babi tersebut terdapat pengucapan Lafaz bismillah dan tujuannya sudah jelas untuk memperbaikhadan bentuk semungkar atau sesuatu yang dilarang di dalam kitab Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 173 yang menjelaskan larangan memakan makanan yang haram namun terdakwa dengan sengaja tetap memakan makanan tersebut;

- Menurut saksi dengan menampilkan konten kepada orang lain sama saja dengan memancing orang untuk mencoba mengkonsumsi babi selain itu pertubuhan terdakwa memakan babi sambil mengucapkan bismillah menjustifikasi bahwa makanan tersebut sudah halal;

- Bahwa saksi menonton video terdakwa sampai habis yang mana selain mengucapkan lapaz Bismillah terdakwa juga menyebut nama Allah yang menunjukkan bahwa dirinya berstatus Agama Islam;

- Bahwa setelah saksi melihat video tersebut saksi merasakan sakit hati dan benci dengan pertubuhan terdakwa yang dengan sengaja memasak babi sambil menyebut nama Allah selain itu terdakwa juga beragama muslim yang mana semestinya sudah mengetahui secara jelas jika babi itu dilarang untuk dikonsumsi;

- Bahwa video makan babi terdakwa merimbulkan komentar pro dan kontra yang menjadikan timbulnya kekacauan di dunia maya seperti contoh Ade Armando yang meratifikasi bahwa makan cabi itu diperbolehan hal tersebut dapat dikatakan sebuah kesalahan karena telah menahkuk alat nafsu yang sendiri dengan membuat makan khinzi di dalam Al-qur'an;

- Bahwa secara pribadi saksi akan memaafkan kesalahan terdakwa asal proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya agar menjadi pelajaran umum yang lain bahwa agama Islam tidak boleh dipermainkan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa, memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Martiniawati Binti Ir. Basaendin dibawan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 729/Pdt.Sus/20233PN Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan BAP saksi dalam berdasarkan perkara;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi melihat konten video terdakwa makan kruk babi;
 - Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, anak saksi yang berumur 20 tahun datang dan memperhatikan video seseorang perempuan dengan menggunakan pakaian yang sangat minim kepada saksi lalu saksi mendengar perempuan tersebut mengucapkan "bismillah" dan setelah itu memakan kruk babi;
 - Bahwa memang saksi tidak Bismillah itu nama yang kami anggupkan dan terdakwa jelas makan yang di haramkan dan agama saksi bahwa terdakwa telah menghalalkan apa yang sudah di haramkan padahal dengan menyebut Asma Allah tidak menjadikan yang haram itu menjadi halal;
 - Bahwa saksi memantau video terdakwa yang mana terdapat komentar-komentar Netizen yang Pro maupun Kontra setringgi, ratusan komentar tersebut merupai pernyataan adanya kegaduhan atau perang antar netizen di dalam media sosial seperti contoh komentar yang kompa "Ieh tau ngak arthya bismillah tu apah tuh dengan nama allah, sudah jelas kan dan babi itu sudah diharuskan oleh allah tulus si songong itu makan menyentut nama allah apa itu bakan pengiraan... dan sebagian netizen juga ada yang pro ke terdakwa seperti "terlalu berlebihan dan dipaksakan jika dianggap sebagai penistaan agama".
 - Bahwa saksi sangat mendengar ketika terdakwa mengucapkan latadz Bismillah di awal video tersebut yang mana latadz tersebut sempela ia ucapkan dalam keadaan sadar yang dibuktikan "dengan makan ini saya dikeukarkan dari karri kelusukan".
 - Bahwa selain melafazkan Bismillah terdakwa juga menyebut nama Ya..Allah dan dengan kesadaran diri terdakwa memvideokan sindikan tersebut;
 - Bahwa perasaan saksi ketika menonton video tersebut saksi sangat marah dan benci karena sudah menggunakan pakaian minim serta terbuka telanjang dengan terang-terangan menghina agama Islam dengan melafazkan Bismillah sambil memakan kruk babi karena perbuatan terdakwa yang menyentutkan nama Allah dengan sengsara yang diluaran sana adalah tidak pantas apalagi pertumbuhan tersebut di upload ke media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sozial sehingga ditakutkan akan dicontoh oleh anak dibawah umur yang memondon video teatalkwa tersebut.

- Bawha saksi tidakkan marah dan merasa benci apabila terdakwa tidak melatarkan Bismillah atau menyebut nama Allah karena orang lain tidak mengerti/hanya bawha terdakwa sendiri beragama Islam blierah hal tersebut menjadi urusannya dengan Allah;
 - Bawha saksi memberikan penjelasan kepada anak saksi bahwa sebagai seorang muslim di Haramain untuk memakan hewan hibti, darah dan bangkai yang mana aturan tersebut sudah tersulit jelas di dalam Kitab Al-Quran;
 - Bawha saksi melihat video tersebut melalui aplikasi Nook milik anak saksi;
 - Bawha saksi menonton video tersebut sampai dengan selesai; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berar dan tidak keberatan;
 - 3. Saksi Zarkeish Bin Jasmani, ditawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawha saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bawha saksi membentuk BAP saksi dalam berkas perkara;
 - Bawha saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keturunan dengannya;
 - Bawha saksi baru mengetahui video tersebut pada pertengahan bulan Maret melalui Handphone dan akun Nook milik saksi

Bahwa salis membuka akun skol @lma_muajre dan melihat konten video yang disebarluaskan terdakwa yang mana terdakwa makan krik babi sambil bicara dengan kalimat sebagai berikut: "Bismillah, eh kaka, guys, Hari ini aku kayaknya dipecat dari karir keluargaku karena aku perasaran banget sama yang namanya krik babi ya, jadi hari ini nukun makan udah aku langgar walaup pasti di karir keluargaku dicabut tapi aku cuma perasaran karena di poto kku banyak iklan yaa, ngrt kkk makan krik babi aku merindung ya, kematian risikan dinggungnya bisa aja, ask Nu udah berapa kali makan babi ? totolnya tiga kali ya, pertama di sri lanka, waktu itu aku ga sempela makan, aku ga bisa bahasa Inggris pok gtu kuu, ntar pok pok, aku lepok pok pok jadi waduh ususku mesiu masih putul empar tahun, terus abis makan babi aku tanya sama ex aku kan, eh masih dimana ?? daya daya nanya massar, udah makan (lantau). Tetus

Macmillan 33 über 39 Potsdamer Allee 17069 Berlin (030) 9719-111

Chapter 13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id



yang kedua kemaren ada acara di tempatnya non ya non, teman yang kedua ini aku dengan kesadaran diri yes. Cuma pengen sehati kek apa sih rasanya, kruk babi yang name di.... Ya alah dipecat ini dari keru keluarga. Kok rasanya kayak ini yeah. kruk babi kayak daging sapi yang dijemur yang keras ga seenak orang yang cerita di titok sih aku ya. Kalo aku b apas, ya alah tuur ada yang masuk poskesmas ni keluarga ku. Maafkan aku ya cuma konten kok".

- Bawha video makan babi terdakwa menimbulkan komentar pro dan kontro, mungkin yang beragama non muslim memakan daging bagi tu tidak bermasalah dan bisa dikonsumsi sedangkan di dalam agama islam memakan babi itu tidak diperbolehkan;

- Bawha didalam konten tersebut bentuk penistaan agama islam terdapat pengucapan Lafaz bismillah adalah kalimat saci, dengan sadar memakan babi kruk, dan duploai pada akun titok @lilmukej kemudian di kalimat akhir juga terdapat kata "ini hanya konten " sehingga menurut kami hal ini berulang penistaan terhadap ajaran agama islam;

- Bawha sebagai seorang muslim saksi merasa sedih dan tidak pantas untuk dilakukan karena memakan babi dengan melatarkan bismillah yes itu tidak diperbolehkan di dalam islam apalagi perbuatan tersebut dilakukan tentunya secara sadar dan serang-terangan;

- Bawha saksi mengucapkan Bismillah terdakwa juga menyebut nukun iman dalam video tersebut;

- Bawha saksi tidak mengetahui bagaimana kult babi itu akhir tetapi di dalam videonya terdakwa sendiri yang mengakui bahwa dirinya memakan kult babi;

- Bawha saksi pernah melihat dan mendengar di media sosial bahwa terdakwa telah meminta maaf saat diromi diamantri oleh POLDA SUMSEL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan penjelasan berulang dan tidak keberatan;

8. Saksi KH. Khobir Asyari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawha saksi dalam kondisinya selalu jasmani dan rohani;
- Bawha saksi membacaan BAP saksi dalam berkas perkara;
- Bawha saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 726/Pd.Sus/2023/Pn Pg



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi baru mengetahui video tersebut 3 (tiga) bulan yang lalu ketika saksi Sapriadi selaku muhib saksi mengirimkan video makan batu terdakwa;
 - Benar ketika pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 05.45 WIB saksi Sapriadi menghubungi saksi dan berkata "Assalamualaikum Ustad, mohon berkenan berikan pendapat dari video yang saya kirim rencana mau saya laporan tentang penistaan agama" dan saksi pun menjawab "Bismillah, kita ditakdirkan Allah" uberikan wewenang untuk mengambil bagian dalam amar maaf nabi mukarr, Allah penolong kita dan pembela teribah";
 - Bawa selanjutnya saksi pun dihubungi oleh saksi sapriadi kemudian saksi memberikan nashhat "pesan dan hasilnya kedua kalian melihat kemungkiran maka ini tiga cara untuk meneguranya : pertama dengan tanganmu, pertama dengan Islammu dan ketiga dengan hadumu, atas video ini maka gunakan tangan kalian, karena kita ini mta u amr dan u amr itu adalah pemerintahan dan pemerintahan memiliki polisi dan yang memiliki wewenang itu adalah polisi. Maka dari itu silahkan kalian laporan";
 - Bawa ketika saksi melihat sekilas video tersebut saksi mengatakan Allah sudah di imia sebagai umat Islam saksi sekitar habi karena agama alia sudah dihina secara terang-terangan dan bagaimana seorang yang beragama Islam bisa mematahkan agamanya sendiri sehingga perbuatan tersebut harus saksi benci;
 - Bawa saksi tidak menonton video sampai selesai karena saat itu terdakwa menggunakan pakaian yang tidak tertutup dan haram bagi saksi melihat aurat perempuan yang terbuka namun saksi mendengarkan suara terdakwa saja yang mana saat itu selain Bismillah terdakwa juga menyebut nama Allah dan nafuk iman;
 - Bawa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membuat video tersebut namun saksi mengambil kesimpulan jika tujuannya untuk memperhatikan kesembongan terhadap dirinya dan pertumbuhan menantang Allah SWT, dengan cara menyrepelakan, memperlo di dalam media sosial dengan cara memakai klink babi sambo merujukapkan lafaz "Bismillah" kemudian berbicara tentang keimanan dirinya namun dengan terang-terangan melakukan hal tersebut;
 - Bawa secara pribadi tidak ada kata mengajak, namun terdakwa sudah mengetahui makarun tersebut adalah hal yang haram bagi muslim namun tetap dikonsensi dengan mengucapkan nama Allah merupakan bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penolongannya terhadap Allah dan apabila dilakukan oleh orang lain yang beragama muslim yang saat itu sedang merenung sehingga akan menimbulkan kerugian bagi umat Islam yang lemah imannya;

- Bahwasan perasaan saksi sangat marah ketika seorang muslim mendahului sesuatu yang jelas dilarang oleh Allah namun tetap melapazukan Bismillah, jika terdakwa tidak mengucapkan kata sacral tersebut maka saksi tidak bermasalah dan beranggapan bahwa terdakwa bukanlah seorang muslim;
- Bahwasan saksi tidak pernah mendengar terdakwa meminta maaf melalui sosial media;
- Bahwasan menurut saksi apabila terdakwa sudah meminta maaf maka pasti akan dimaafkan namun secara hukum harus tetap dihukum;
- Bahwasan perbuatan baik saja yang tidak diawali dengan lippat Bismillah terpuas sudah kebalannya apabila perbuatan yang dilarang yang diawali dengan Asma Allah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ketebalan;

7. Saksi Dr. Nurkhaldis, M.Ag Bin Surjo (Anggota Majelis Ulama Indonesia) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwasan saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwasan saksi memberikan BAP saksi dalam berkas perkara;
- Bahwasan saksi berangas sebagai Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Prov. Sumsel sejak tahun 2018 s.d sekarang dan memiliki tugas memberikan fatwa, nasihat dan fatwa terkait permasalahan waris, aliran sesat, sentifikasi halal dan semua permasalahan terkait agama Islam setelah adanya pengaduan / laporan dari masyarakat baik individu ataupun kelempok;
- Bahwasan saksi telah melihat video terdakwa sampai selesai menggunakan Handphone milik saksi ;
- Bahwasan terkait yang dilakukan oleh terdakwa yakni mengkonsumsi babi dengan melafazkan Bismillah yang mana makanan tersebut sudah termasuk melanggar kaidah Islam;
- Bahwasan fungsi dan keadaan MUI yakni untuk mengayomi umat dan untuk mencari solusi yang baik dan sebagai mitra pemerintahan terkait masalah Keagamaan;

Hasillemen 26 dan 39 Putusan Nomor 72/9/Pd.Sus/2023/PN Pg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha jika ada yang sampai kepada kami selaku anggota MUI maka kami mengajui dengan cara riset dan melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang diperlukan.
 - Bawha bermula MUI mendapat pengaduan dari masyarakat terkait video makan kruk babi yang dilakukan terdakwa yang mana video tersebut dianalisa dengan kata Bismillah setelah itu memakan kruk babi selanjutnya pihak MUI mengklarifikasi kasus ini dan mengeluarkan FATWA Nomor : 03/MUI-SSIN/2023 tanggal 12 April 2023, yang berisikan :
 1. Video makan kruk babi dianalisa menyebut kata 'Bismillah' disandingkan dengan barang yang haram, itu masuk dalam kategori merendahkan, menghina dan mendiskreditkan ajaran Islam.
 2. Bawha hewan babi memenuhi syarat ajaran Islam adalah negi mughalidah dan haram untuk dimakan, sebagi saat mengkonsumsi membatasi lahat basmalah.
 3. Bawha apa yang dilakukan Ima Muterjhee dengan sengaja makan kruk babi dengan membatasi lahat basmalah dan diperintahkan di video media akan ditakdirkan mukimnya adalah bentuk penistaan agama.
 4. Kepada pihak berwajib, agar kasus penistaan agama ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Bawha yang menjadi dasar dalam ajaran agama Islam atas perbuatan tersebut yaitu :
 - Al Baqarah ayat 173 dikatakan Diharamkan bagi kamu, bangkai, dahan, daging babi, dan hewan yang disimbah tidak menyebut nama Allah;
 - Al Mâidah ayat 3, An-Nâhâ ayat 115 yang isinya juga mengharamkan memakan babi;
 - Bawha ada kasus-kasus yang dapat dibimbangi oleh pihak MUI seperti kasus Penghinaan maupun ajaran sesat dapat dibimbangi dan diberitahukan bahwa yang dilakukan tidak benar namun untuk perkara terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu tidak perlu bimbang dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
 - Bawha perasaan sakit ketika melihat video tersebut sakit merasa marah, temina dan menyayangkan perbuatan terdakwa tersebut yang mana ia sendiri telah menyadari bahwa kita yang beragama muslim dilarang untuk memakan babi, bangkai dan dahan sedangkan terdakwa secara leluhur-beluhan melakukan perbuatan yang diambil oleh Allah

transient T7 phage DNA from Moray Firth fish 2003/04

Volume 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyandarkan hadz Bismillah yang seharusnya tepat tersebut diucapkan saat kita hendak melakukan perbuatan yang baik dengan tujuan agar perbuatan yang dilakukan benar-baik dan mendapatkan pahala deini Allah;

- Bahwa apabila terdakwa sudah mengakui dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan sesuai ajaran Islam maka secara pribadi saksi akan memfasilitasi kesulitan terdakwa asal proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya agar menjadi pelajaran untuk yang lain bahwa agama Islam tidak boleh dipermainkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pendapat Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., disertasi yang dibawah sampaikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli adalah dosen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas;
- Bahwa Ahli pemah diantara kesulitan sebagai ahli di POLDA SUMSEL, terkait penyebaran informasi melalui aplikasi tictok yang kemudian menimbulkan laporan polisi dari pihak yang tidak menyukai isi konten tersebut;
- Bahwa Ahli menguraikan Umar Pasal 26 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau perusakan individu dan/atau kelompok masyarakat terutama berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antarbangsa (SARA)".
- a. Setiap orang adalah sesuai Pasal 1 angka (2) UU RI No.19 tahun 2016 definisi setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum,
- b. Dengan sengaja, bahwa terdakwa mengetahui dan menghindari melakukan suatu perbuatan yang akibatnya tersebut informasi melalui pemanfaatan sistem elektronik,
- c. Tanpa hak menyebarkan informasi bahwa terdakwa tidak memiliki hak karena perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, berentangan dengan hak orang lain, berentangan dengan hukum yang berlaku dalam menyebarkan informasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permasalahan berdasarkan Sistem Analisa, Rasa dan Antropologis (SARA).

- d. Yang dibutuhkan untuk memenuhi rasa kebercakatan atau permuasian individu atau kelompok Masyarakat tertentu bahwa kebercakatan atau permuasian dapat berasal dari individu atau kelompok masyarakat tertentu;

e. Berdasarkan mitos Suku, Antar Golongan, Ras dan Agama (SARA) bahwa kebercakatan atau permuasian yang berkaitan dengan Suku berarti golongan orang-orang yang sekuturannya, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar. Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengajari tata kelaruan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan bahwa golongan adalah kelompok yang dapat dibedakan dengan kelompok lain baik formal maupun informal yang memiliki kesamaan nilai / tujuan / fungsi / kedudukan. Bahwa dalam pemahaman pasal tersebut benar telah terjadi penyebutan norma kacara hal tersebut dapat diakses oleh orang lain melalui media sosial tdkl;

Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa tolok ukur bahwa suatu perbuatan menyebarkan informasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk meminimalkan rasa kebercakatan atau permuasian intiutif dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ialah;

 1. Adanya orang yang menggunakan atau memanfaatkan sistem elektronik, media elektronik, jaringan computer;
 2. orang tersebut sengaja melakukan perbuatan sehingga memerlukan informasi sehingga dapat diketahui umum;
 3. Informasi yang disebarkan dapat menimbulkan kebercakatan atau permuasian individu atau kelompok dalam Masyarakat;
 4. Informasi yang tersebut berkaitan dengan SARA;

Bahwa memulih Atih pada video makan habis ikut akun tdkl @lumukgek tersebut, banyak komentar yang tidak sesuai dengan konten yang dibuat sehingga menimbulkan kegaduhan, ketenangan dan termasuk peristiwa temadap agama yang dalam hal ini adalah agama Islam. Karena dalam video itu juga mencampurkan antara ajaran dan konten karena satz "bismillah" yang diucapkan tersebut tidak bisa menghalalkan yang Haram karena dalam ajaran Islam ada haram untuk dimakan;

Bahwa indeks mengajak, bukan hanya dengan kata "nyoto" secara senarnam dengan indikasi visual yang secara langsung memicu/gapai

Halldorsson 29 days 30 Postscript Name: 726/Pdf/Sun/2002/07/01 11:11:59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isi mukilah dan memakai kruik babi, memanu ahli itu bagian dari apakah yang dipertontonkan pada di media social;

- Bahwas petusan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yatu suatu tindakan komunikasi menyampaikan rasa kebencian, merendahkan agama lain, meristakan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan peryataan terdakwa, yatu Tindakan komunikasi menyampaikan rasa penghinaan atau pelecehan atau penistaan terhadap agama Islam, menyengang perasaan umat agama Islam dan memecah belah umat Islam. Hal ini dibuktikan kalimat-kata-kata terdakwa yang menyebut nama masjid dalam peryataannya, sebagai berikut: „zotakya nge kaf ya.. pertama di silanka, waktu itu aku ga sengaja makan, aku ga bisa bahasa inggris pok gitu kan, aku pikir pok itu lepok pok pok pok jadi waktu usaha masih dia pokit empar tahun, renas abis makan babi aku tanya sama ex aku kan, eh masjid olmane ?? gaya gaya nanya masjid udah makan (retawal)...“ Secara sosiologi peryataan diatas mengandung pemusuhan dan kebencian serta pelecehan dan penghinaan kepada umat Islam. Hal ini dibuktikan adanya kata bismillah dan masjid yang tentu saja sangat jelas disujukan kepada pemeluk agama Islam, perbuatan terdakwa yang membuat konten video maluan kruik babi dengan

link

<https://www.tiktok.com/@lumukerji/video/7208428147918486810> yang diupload oleh tktok @lumukerji tersebut merupakan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyialan-guruan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

- Bahwas terlepas yang memakan kruik babi dan dposting ke dalam media sosial tidak tersesut adalah non muslim, yang pokok adalah setbagaimana pendapat kedua AHLI di atas bahwa kata-kata yang dimaksudkan oleh orang dalam video tersebut di atas akan pasti drespon dengan sikap permusuhan dan kebencian oleh pemeluk agama islam karena merupakan tindakan yang menentahkan ajaran agama Islam atau berujar untuk memprovokasi, menghina, menghina, merendahkan, menyengang perasaan dan merendahkan pemeluk agama Islam;
- Bahwas pemblokiran akun itu dilakukan oleh Kementerian Informatika namun tidak semua akun dapat di blokir tergantung konten-konten tertentu seperti konten pencemaran nama baik itu tidak dapat langsung diblokir harus meninggung putusan yang berkekuatan hukum terlebih dahulu begitu juga dengan konten yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam perbuatan tidak pidana ITE tentunya menggunakan Internet yang mana di dalam dunia cyber terdapat teori uploader ialah pihak yang memberi informasi ke dalam cyber space dan teori downloader ialah pihak yang mengakses informasi;
 - Bawa seharusnya terdakwa harus memperiksa dampak atau akibat dari perbuatan tersebut;
- Mesimbang, bawa telah pula memberikan pendapat Ahli R. Ade Hartawan, S.T., M.T. diper辯dangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bawa Ahli telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex dan iPhone 14 Pro Max Warna Purple (Ungu) dilakukan dengan carabackup file dari DVD-R merk Vertex kapasitas 4.7 GB, pemilik atas nama SYARIF HIDAYAT Bin SYAMSUDIN, ditemukan data-data berupa 2 (dua) buah video files dan 2 (dua) buah Images files yang terkait akun Tiktok @lilumukejji;
 - Bawa Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk apple model : iPhone 14 pro Max warna ungu IMEI : 358795287230224, pemilik atas nama LINA LUTFIAWATI Als LILU Als LINA MUKERJEE Binti ABDUL MUKHTIT, ditemukan 2 (dua) buah video files yang memperlihatkan momen Terdakwa LINA LUTFIAWATI Als LILU Als LINA MUKERJEE Binti ABDUL MUKHTIT sedang duduk menghadap sebuah meja dan makan kruk babi pada aplikasi Tiktok yang terpasang dengan akun atas nama "@lilumukejji" dan aplikasi Youtube yang terpasang dengan akun atas nama "@lilumukherjee";
 - Bawa akun tiktok dan akun youtube milik terdakwa tersimpan di dalam Iphone milik terdakwa;
 - Bawa saksi melakukan pemeriksaan secara Fisikal yakni mengambil semua data dari iphone milik terdakwa selanjutnya dilakukan index file selanjutnya ahli masuk keakun terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) video tersebut;
 - Bawa dilihat dari akun yang dimiliki seharusnya hanya terdakwa yang memiliki Email dan password terhadap akun miliknya namun tidak memungkinkan orang lain juga dapat mengendalikan akun tersebut jika mengetahui email dan password milik terdakwa.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 726/Pdt.Sus/2022/PN Pgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pendapat Ahli Assoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., S.H., M. Hum., dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa profesi Ahli adalah dosen Program Studi Linguistik Pascasarjana UPI dan Konsultan Bahasa Hukum Selgas Presisi Difitpidar Bereskim Pot;
 - Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli oleh Subdit 5 POLDAM SUMSEL terkait penyebaran informasi melalui media sosial tidak;
 - Bahwa Ahli menguraikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Setiap orang dengan sengaja dan tanpa AKT menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau perusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan alas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA):
 - a. Setiap orang adalah sesuai Pasal 1 angka (2) UU RI No.19 tahun 2016 definisi setiap orang adalah orang perseorangan, bule warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 - b. Dengan sengaja, bahwa terdakwa mengetahui dan menghindari melakukan suatu perbuatan yang akibatnya tersebut informasi instansi pemerintahan siasat elektronik;
 - c. Tanpa hak menyertakan informasi bahwa terdakwa tidak memiliki hak karena perbuatan yang dilakukan tanpa atau melewatkan wewenang, berentang dengan hak orang lain, berentang dengan hukum yang berlaku dalam menyebarkan informasi dengan konten yang dapat menimbulkan kebencian atau perusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA);
 - d. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau perusuhan individu atau kelompok Masyarakat tertentu bahwa kebencian atau perusuhan dapat berasal dari individu atau kelompok masyarakat tertentu;
 - e. Berdiekspresikan atas Suku, Antargolongan, Ras dan Agama (SARA) bahwa kebencian atau perusuhan yang berkaitan dengan Suku besar golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dan suatu bangsa yang besar, Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seorang atau sekelompok orang yang

Ministry 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tata krama dan kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ras adalah golongan manusia berdasarkan diri dan hak, serta antar golongan bahwa golongan adalah kelompok yang dapat dibedakan dengan lembaga lain baik formal maupun informal yang memiliki kesamaan nilai / tujuan / fungsi / kedudukan;

- Bahwa Linguistik Forensik sering dikatakan sebagai salah satu cabang Linguistik yang tergolong ke dalam kategori Linguistik Terapan (applied linguistics), yaitu ilmu bahasa yang diterapkan dan atau dimanfaatkan di dalam ranah kehidupan tertentu. Alas dasar pengertian itu, istilah "Linguistik Forensik" dapat diartikan sebagai wujud dari penerapan ilmu bahasa (linguistik) di ranah hukum dan peradilan;
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang secara khusus perlu diperhatikan dalam kajian Linguistik Forensik adalah ketentuan substansif (materi) dan ketentuan operasional (etika akademik). Beberapa hal yang terkait dengan ketentuan substansif adalah seperti berikut:
 - Linguistik Forensik adalah kajian bahasa di ranah hukum, bukan sebaliknya. Linguistik Forensik menempatkan bahasa sebagai objek studi, sementara hukum adalah konteks kajian. Hal ini perlu dibagaskan karena secara epistemologis, kajian bahasa di ranah hukum berbeda dengan kajian hukum di ranah bahasa;
 - Linguistik Forensik memandang eksistensi bahasa dalam konteks (penegakan) hukum ke dalam dua dimensi, pertama secara statis, bahasa merupakan alat nyamai atau cermis yang dapat mewakili dengan baik alat sebagai hal yang sudah berlangsung di dalam proses sosial yang dilakukan manusia. Dan yang kedua secara dinamis, bahasa merupakan instrumen utama yang berperan memudahkan terjadinya proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, untuk analisis dalam Linguistik Forensik mencakup dua hal, yaitu *Language as legal evidence*, dan *Language as legal process*;
 - Analisis Linguistik Forensik harus tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Sebab, ketentuan hukum itu merupakan konteks yang tidak berlaku secara universal, kecuali kesatuan hukum internasional yang dikonsensusi untuk mengatur tindakan seluruh masyarakat dunia;
 - Bahwa analisis Linguistik Forensik harus dijalankan (secara aplikatif) dengan didasarkan pada etika akademik yang berlaku secara universal di lingkungan masyarakat akademik, khususnya masyarakat analis bahasa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomer 709/Pef/Rux/2023/PN/Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Adapun ketentuan operasional yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip objektivitas, prinsip ini memberikan arahan bahwa seorang analis Linguistik Forensik harus memiliki sikap yang objektif. Objektif berarti apa adanya. Artinya, seorang analis Linguistik Forensik harus memiliki kemampuan untuk melihat, memahami, menafsirkan, dan mempresentasikan data bahasa sebagai unit analisis sesuai dengan apa yang dilihatnya tanpa kepentingan atau tendensi pribadi apapun;
2. Prinsip konsistensi, prinsip ini memberikan petunjuk bahwa seorang analis Linguistik Forensik harus bersikap konsisten, ajeq. Konsisten berarti tidak berubah-ubah, tetap. Artinya, dalam memandang data bahasa sebagai unit analisis, seorang analis Linguistik Forensik harus memiliki pandangan yang konsisten;
3. Prinsip relativitas, sebagai ilmu yang sangat luas Non-Eksasta, kajian Linguistik Forensik tidak menempatkan kebenaran suatu metode atau pemikiran dari suatu aliran kajian bahasa sebagai hal yang mutlak untuk diakui sebagai satu-satunya teori yang paling benar. Dalam pandangan Linguistik Forensik, teori atau metode yang digunakan sebagai pisau analisis data bahasa dikendalikan atau ditentukan oleh data bahasa yang dihadapinya (theory driven by the data);
- Bahwa dalam perspektif bahwa hukum, penyebarluasan penyebarluasan informasi yang diajukan untuk menimbulkan sasa kebencian atau pemusnahan individu dan/atau kelompok masyarakat berlaku berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antarbangsa (SARA) dapat dihakim apabila adanya informasi yang menjadi berpidanah dan menjadi diketahui oleh orang lain. Hal ini merupakan hakikat dari penyebarluasan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Perbuatan yang dengan sengaja dilakukan adalah perbuatan adimy kehendak dan inayati untuk mencapai tujuan tertentu. Di muka umum mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan yang pada prakteknya berlakul permuasuhan, perwaliuguran atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yaitu sebuah ajaran yang tidak halangan bagi orang lain untuk melihat komunitas secara jelas dengan tujuan untuk menimbulkan sikap pemusnahan dan kebencian kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor: 726/Pdt.Sus/2023/Pn.Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat yang disampaikan oleh orang yang terdapat dalam video tersebut tergolong sebagai sebuah tindakan yang melecekan dan menyiksi hati umat Islam karena perkataan suaranya yang sangat jelas menempatkan bahaya halam hukumnya bagi umat Islam untuk memakan daging babi. Terlebih dalam video, orang dalam video tersebut, secara sadar, menyebut nama Allah (Bismillah) sebelum menyampaikan krik babi, jelas tergolong sebagai pernyataan, ujaran yang dapat memicu sikap permusuhan dan kebencian pada individu dan atau kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini pemeluk agama Islam yang merasa disiksi karena orang dalam video tersebut memiliki maksud secara terang benderang untuk merendahkan ajaran agama Islam;
 - Bahwa dari pandangan tindak turu bahasa, tindakan orang dalam video tersebut mengandung dua dimensi. Pertama, tindakan tersebut akan jalin dengan sikap permusuhan dan kebencian oleh pemeluk agama Islam karena Resolusi nama Allah digunakan untuk mengawali sesuatu yang tergolong sebagai dosa besar perspektif agama Islam. Kedua, tindakan tersebut tergolong sebagai tindakan yang merendahkan ajaran agama Islam karena orang dalam video tersebut, secara sadar, melakukan tindakan yang tergolong sebagai dosa besar di depan publik dan dengan makna untuk diberitakan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan secara tidak langsung dan secara implisit, ada upaya untuk mengajak orang lain, walaupun tidak terang secara khusus kepada orang Islam, untuk menyampaikan krik babi dan mengawaliya dengan lafadz bismillah. Sepertumya sebagai publik figur mestinya momok kesadaran bahwa perilaku dan sebagian perkataannya akan menjadi perhatian dan contoh bagi orang lain selain itu tentu bermaksud untuk memanggil (raport) agar tindakannya tidak disikahi sebagai sebuah kampanye atau provokasi sehingga mengakibatkan hal tersebut hanya sebagai konten namun faktanya secara sadar dinilai sebagai tindakan untuk mencari traffic agar mendapat penghasilan atau keuntungan;

Memring, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa Lina Lubiswati Alias Lili Alias Lina Mukherjee Binti Abdul Muchtar, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebaga berikut:

- Bawa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bawa terdakwa membenarkan BAP terdakwa dalam berkas perkara;
 - Bawa terdakwa bertobatna islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwas terdakwa membenarkan jika dalam video yang diupload benar dirinya dan terdakwa juga membenarkan perbuatannya dalam hal konten makan babi tersebut.

- Bahwas pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa bersama dengan asistennya berkata "Yok cobain ikut babi" dan dengan sengaja mendatangi Rumah Makan Babi Guling Sian Tukad yang beralamat di Jalan Sri Rama No. 8 Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kecamatan Badung Provinsi Bali lalu saat makanan kruk babi telah dihidangkan, terdakwa pun menyuruh Asistennya untuk merekam video terdakwa makan kruk babi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone jenis Iphone 14 Pro Max Warna Purple (Unyu);

- Bahwas dalam video tersebut terdakwa mengatakan "Bismillah, oh kuya, guys. Hari ini aku kenyangnya dipercat dari Ibu Pak Keluarga karena aku penasaran banget sama yang namanya ikut babi ya, jadi hari ini nihan Iman udah aku anggap untuk pasti di karo keluargaku dibayar nih atau cuma penasaran kewena di ikomik ku banyak kruk yaa, nih ikut makan kruk babi aku menindang yaa, kenyam makan dogingnya bla bla aja, kruk kruk udah berapa kali makan babi ? korraine tiga kali ya, pertama di srianku, waktu itu aku ga sempat makan, aku ga bisa bahasa Inggris pokok gitu kan, aku pokok pokok tu sepek pok pok pok jadi nihuu usiaku masih bisa puluh empat tahun, terus abis makan babi aku tempa sama ek also kan, eh masih dimanji ?? gaya gaya nenyu mirejel, udah makan (teriaway). Terus yang kedua kenyam ada acara di tempatnya non ya non, terus yang ketiga ya atau dengan kesadaran diri yaa. Cuma pengen rasain lek apakah sih rasanya, kruk babi yang name di... Ya alah dipercat ini dari kamu keluarga, kok rasanya kayak ini yaa, kruk babi kayak doging sapi yang dijemur yang kebas ga seennak orang yang cemte di otak sih also ya, halo nku o ajaa, ya alah takut ada yang masuk puskesmas ni keluarga ku. Maafkan aku ya cuma konten klok".

- Bahwas terdakwa mengupload video yang sama dengan berturasi 1.40 (satu menit empat puluh detik ke akun youtube dan akun tiktok yang baru terdakwa buka kemanduan ditonton oleh 4,5 juta penonton indonesia namun setelah viral video tersebut di tonton oleh orang Malaysia, Singapore dan negara lainnya;

- Bahwas sebelumnya terdakwa juga pernah membuat konten makan kodok dan makan-makanan yang ekstrim dan konten tersebut tidak ada masalah lalu timbulah inisiatif terdakwa untuk membuat konten memakan babi;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus/2023/PN Pdg



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa hanya tseng dan tidak memiliki dampak kedepannya yang membulatkan kegaduhan yang mana datan hal tersebut terdakwa sangat menyelak sekali dan andai waktu dapat terulang malu terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyadari kesalahan yang dilakukan yakni dengan sengaja memakan bali yang siasatkan dengan membaca. Bismillah perbuatan tersebut terdakwa upload ke sosial media;
 - Bahwa terdakwa mengikuti komentar para netizen yang mana terdakwa juga ikut mengomentari komentar yang dilontarkan sehingga dari komentar tersebut membulatkan kegaduhan dan perang antara para warganet;
 - Bahwa semua konten terdakwa dilakukan sendiri secara spontan tidak ada kreator ataupun penciptaan naskah tersebut dahulu;
 - Bahwa terdakwa tidak mendapatkan penghasilan dari youtube karena yang menonton video tersebut hanya mencapai 3 (tiga) ribu penonton akan tetapi terdakwa mendapatkan penghasilan dari aplikasi tiktok;
 - Bahwa terdakwa telah meminta maaf melalui media sosial Instagram, Insel TV, SCTV, dan saat terdakwa pertama kali ditahan oleh penyidik dan saat itu juga menyampaikan terdakwa masyarakat, mengakui perbuatannya serta telah meminta maaf secara langsung kepada para sekisi;
 - Bahwa terdakwa membenarkan bahwa bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang merupkan *lawyer charon*.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperiksa dan diteliti barang bukti yang dilaikkan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Veritek;
 - 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor HP 085691200001;
 - 1 (satu) buah akun diktak @ilmuukerjilink <https://www.diktak.com>;
 - 1 (satu) Unit komputer, jenis ribebe 14 Pro Max Warna Biruksa Cokelat;

- Bawha terdakwa memberikan juga dalam video yang duploa benar dirinya dan terdakwa juga membenarkan peristiwa dalam hal konten makan babi tersebut;
 - Bawha benar pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa bersama dengan asistennya beraku "Yok cobain kasi babi" dan dengan sengaja mendatangi Rumah Makan Babi Guling Sisiruk yang beralamat di Jalan Sri Ramu No. 8 Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali lalu saat makanan kruas babi telah

Volume 37, Issue 39, February 2019, Number 725 of the *Stanford Law Review*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya, terdakwa pun menyuruh Asistennya untuk merekam video terdakwa makan babi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone jenis Iphone 14 Pro Max Warna Purple (Ungu).

- Bawha benar dalam video tersebut terdakwa mengatakan 'Bismillah, eh kaya guys, Hari ini aku kayaknya diperceat dari kemu keluarga karena aku perasanin banget sama yang namanya kuku babi ya, jadi hari ini nihun ihan utuh, aku langsung utuh pasti di kemu keluargaku dicabut napi aku cuma perasanin karena di ikotku ku banyak kuku ya, tapi kok makan kuku babi aku merindu ya, kemarin makan dagingnya biasa aja, kakku udah beberapa kali makan babi ? totalnya liga kesel ya pertama di smanaku, mardu tuh aku ga sempaje makan, aku ga bisa nambahi inggris pok pok kan, aku pilih pok pok lepas pok pok jadi waktu usaha masih diutamai empat hari, nihun abs makan babi aku tanya sama ex aku ken : eh mengk elmane ?? givre paya ntaru mengk, udah makan (bertawa). Terus yang kedua kemaren ada acara di tempatnya non ya non, terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri yaa. Cuma pengen rasa kek apa sih rasanya, Anak babi yang rame ol... Ya alah diperceat ini dari kemu keluarga, kok rasanya kayak ini yaa. Atuk babi kayak daging sapi yang dijemur yang kekep ga seennak orang yang cente di ikotku sih aku ya, kalo aku ti aja, ya alien takut ada yang masuk pukkesmas ni keluarga ku. Maafkan aku ya cuma kenton kokin.

- Bawha benar terdakwa mengupload video yang sama dengan berdurasi 1:40 (satu menit empat puluh detik) ke akun youtube dan akun tiktok yang baru terdakwa bikin kemudian ditonton oleh 4,5 juta penonton indonesia, namun tentu viral video tersebut di tonton oleh orang Malaysia, Singapore dan negara lainnya.

- Bawha benar terdakwa menyadari kesalahan yang dilakukan yakni dengan sengaja memakan babi yang disandingkan dengan memiteca Bismillah perbuatan tersebut terdakwa upload ke sosial media.

- Bawha benar semua kordin terdakwa dilakukan sendiri secara spontan tidak ada kreator ataupun penciptaan naskah terlebih dulu;

- Bawha benar terdakwa tidak mendapatkan penghasilan dari youtube karena yang menonton video tersebut hanya mencapai 3 (tiga) ribu penonton akan tetapi terdakwa mendapatkan penghasilan dari aplikasi tiktok;

- Bawha benar terdakwa mengaku hanya sang dan tidak memrikir dampak kidepiannya yang merimbukan kegaduhan yang membanjiri hal tersebut terdakwa sangat menyayal.

- Bawha benar terdakwa telah meminta maaf melalui media social Instagram, inset tv, SCTV dan saat terdakwa pertama kali ditahan oleh

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomer 276/Pref.Buu/2023/PN.Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik dan saat ini juga menyampaikan terdakwa menyakiti, mengakui perbuatannya serta telah meminta maaf secara langsung kepada para saksi;

- Bawhan benar saksi Sapriadi Bin Syamsudin merasa tidak suka, benci dan mengecam video terdakwa yang sudah meremehkan agama Islam dengan menyebut kata Bismillah. Ya Allah disini terdakwa makan kruk babi dan reaksi yang sama juga dimunculkan oleh warganet lain yang menonton video makan kruk babi terdakwa diantarnya saksi Martinewelli Binti H. Basarudin, saksi Husyam Bin Usman, saksi Zakarhi Bin Jasman, dan saksi Sapriadi Bin Syamsudin yang merasa benci, resah dan merasa agamanya telah diremehkan;

- Bawhan benar saksi Sapriadi Bin Syamsudin menghubungi saksi KH. Khobir Asy'ari selaku Ulama meminta pendapat tentang video makan kruk babi terdakwa yang mana saksi KH. Khobir Asy'ari menjelaskan bahwa

komen makan kruk babi yang dibuat terdakwa merupakan bentuk menyimpel agama Allah dengan cara mengunggah video tersebut pada

media sosial sehingga bagi orang lain yang tidak memiliki keimanan akan menganggu orang dan dalam kehidupan bermasyarakat pun hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap sifat yang pertama selanjutnya pada hari

Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi Syaef Hidayah melaporkan perbuatan

terdakwa kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

- Bawhan menurut ahli Dr. Rommy S.Kom., M.Kom., M.H. benar telah terjadi pernyataan informasi oleh Terdakwa karena hal tersebut dapat diakses oleh orang lain melalui media sosial siapapun. Tolak ujar bahwa suatu perbuatan menyebarkan informasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusnahan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ialah Adanya Orang yang menggunakan atau memanfaatkan sistem elektronik, media elektronik, jaringan computer, Orang tersebut sanggup melakukan perbuatan sehingga tersebarinya informasi sehingga dapat diketahui umum, informasi yang disebarkan dapat menimbulkan ketidaksenangan atau pemusnahan individu atau kelompok dalam Masyarakat, informasi yang tersebut berkaitan dengan SARA. Bawa menurut Ahli pada video makan babi kruk akun tiktok @lumurkerji tersebut, banyak komentar yang tidak setuju dengan konten yang dibuat sehingga menimbulkan kegaduhan, kebencian dan termasuk penistaan terhadap agama yang dalam hal ini adalah agama Islam. Karena dalam video itu juga mencampurkan antara akidah dan konten, karena lafadz

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 7269/M/Sus/2023/W/Plg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id



'bismillah' yang diucapkan tersebut, tidak bisa menghalau yang halam

kenaera dalam ajaran islam habi havam untuk dimakar:

- Bahwas Ahli Assoc. Prof. Dr. Andika Duhis Bacharit, S.Pd., S.H., M.Hum telah melakukan pemeriksaan secara Laboratori Kimminidisk terhadap barang bukti berupa DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex dan Iphone 14 Pro Max Warna Purple (Unyu) dilakukan dengan carabackup file dari DVD-R merk Vertex kapasitas 4.7 GB, pemilik atau nama SYARIF HIDAYAT Bin SYAHSUDIN, ditemukan data-data berupa 2 (dua) buah video files dan 2 (dua) buah images files yang terikuti akun Tiktok @lilmukej. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk apple model : iPhone 14 pro Max warna unyu (IMEI : 358795287230224, pemilik atau nama LINA LUTFIAWATI Alias LILU Alias LINA MUKERJEE Binti ABDUL MUKHTAR, ditemukan 2 (dua) buah video files yang memperlihatkan momen Terdakwa LINA LUTFIAWATI Alias LILU Alias LINA MUKERJEE Binti ABDUL MUKHTAR sedang duduk menghadap sebuah meja dan malah kuuk habi pada aplikasi Tiktok yang terpasang dengan akun atau nama "@lilmukej" dan aplikasi Youtube yang terpasang dengan akun atau nama "@Humukherjee". Bahwa akun Tiktok dan akun youtube milik terdakwa terlihat di dalam Iphone milik terdakwa. Bahwa siswi melakukan pemeriksaan secara fisikal yakni mengambil semua data dari Iphone milik terdakwa selanjutnya dilakukan index file selanjutnya ahli mesuk keakur terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) video tersebut;

- Bahwas ahli R. Asri Hartawani, S.T., M.T. berpendapat bahwa dari pandangan tindak suru bahasa, tindakan orang dalam video tersebut mengandung dua dimensi. Pertama, tindakan tersebut akan pasti disespons dengan sikap permuhan dan kebercian oleh pemeluk agama Islam karena kesakitan nama Allah digunakan untuk mengawali sesuatu yang tergolong sebagai dosa besar perspektif agama Islam. Kedua, tindakan tersebut tergolong sebagai tindakan yang merendahkan ajaran agama Islam karena orang dalam video tersebut, secara sadar, melakukan tindakan yang tergolong sebagai dosa besar di depan publik dan dengan makna untuk disebarluaskan. Bahwa Ahli menjelaskan secara tidak langsung dan secara implisit, ada upaya untuk mengajak orang lain, walaupun tidak tertarget secara khusus kepada orang Islam untuk menyantap kruuk habi dan mengamalkannya dengan istadi bismillah. Sepakutnya sebagai publik figur mestinya memiliki kesadaran bahwa praktik dan segala perkawannya akan menjadi perhatian dan contoh bagi orang lain selain itu terdakwa berusaha untuk menangani (heppling) agar tindakannya tidak disalahkan sebagai sebuah

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 728/Mdt/Slu/2023/PW/PG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye atau provokasi sehingga mengabalkan hal tersebut hanya sebagai isu namun faktanya secara sederi dimaknai sebagai tindakan untuk mencari tali dan penghasilan atau keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dicas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diakui kepastiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diakui oleh Penuntut Umum dengan dikoakai singkat sebagaimana datur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa semadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dan suatu perbuatan pidana dalam arti setiap saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan dari keterangan Terpikta. Ketika dianugerah identitasnya Terdakwa menjawab sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dikoakai Penuntut Umum bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana dikoakai Penuntut Umum tersebut adalah terdakwa Lina Lutfiawati Alias Lili Alias Lina Mukherjee Binti Abdi Mukteri, yang dalam proses pemeriksaan sebelum jemarit dan rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat diketahui bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

- Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keeterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan dituliskan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, terdakwa bersama dengan asistennya berkata "yok cobain krik baté" dan dengan sengaja mendatangi Rumah Makan Babi Guling Sinar Tuanku yang berAlamat di Jalan Sri Rama No. 8 Kelurahan Legian Kecamatan Kota Kuta/Baden Badung Provinsi Bali itu saat makanan krik baté telah dibanggunkan, terdakwa pun menyuruh Asistennya untuk merekam video terdakwa makan krik baté tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone jenis iPhone 14 Pro Max Warna Purple (Unyu);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyebarkan video tersebut dengan cara memposting video makan krik baté ke akun tiktok @ilumulerji alamat link <https://www.tiktok.com/@ilumulerji/video/7208429147918486810> dengan durasi 1:40 (satu menit empat puluh detik) yang kemudian ditonton oleh 4,5 juta penonton dan akun youtube @ilmukherjee alamat link <https://www.youtube.com/shorts/JBKWemAz> yang kemudian ditonton oleh 420,901 penonton;

Menimbang, bahwa terdakwa makan krik baté sambil bicara dengan kalimat serupa berikut : "Bismillah, eh kupa, guys. Hari ini aku kiyaiannya dipacet dari kartu keluarga karena aku penasaran bangsa sama yang namanya krik baté ya, jadi hari ini rukun iman udah atau langsung udah pass di kartu keluargaku dicabut sap atau cuma penasaran karena di tiktok ku banyak krik yaa, tapi kok makan krik baté aku merindung ya, kemarin makan dogingnya blasa aja, kak Ibu udah berpura kuli makan baté ? totalnya tiga kali ya, pertama di sialana, wihdu lu atau ga sengaja makan, atau ga bisa bahasa Inggris pok gitu kan, atau pikir pok lu tepek pok pok jadi waktu usiaku masih dua puluh empat tahun, terus abis makan baté atau tanya sama ex aku kan, eh masjid dimana ?? gaya gaya namanya masjid, udah makan (tertawa). Terus yang sedua kemaren ada acara di tempatnya non ya non, teman yang ketiga ini atau dengan kesadaran diri yaa. Cumanya pengen nasiu kei apa sih rasanya, krik baté yang name di... Ya Allah dipacet ini dari kartu keluarga, kok rasanya kayak ini yaaa, krik baté kayak diingat sap yang cilimus yang keras ga seenak orang yang cerita di tiktok sih aku ya, kakaku b apia, ya alih tau selidiki yang masuk putusmas ni keluarga lo. Muathan aya ya cuma komen kok".

Menimbang, bahwa setelah menonton video terdakwa tersebut, saksi Syarif Hidayat Bin Syamsuddin merasa tidak suka, benci dan mengecam video terdakwa, yang sudah menistakan agama Islam dengan menyebut kata Bismillah, Ya Allah disaat terdakwa makan krik baté dan reaksi yang sama juga

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 726/Pdt.Sus/2023/PW/Plg



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan oleh warganet lain yang menonton video makan ikrak babi terdakwa diantarnya, saksi Martinawati Binti H. Basarudin, saksi Husyam Bin Usman, saksi Zakarohi Bin Jasmeai, dan saksi Sapriadi Bin Syamsudin yang merasa benci, resah dan merasa apyarmana telah dinisahkan.

Menengah, bahwa kemudian seksi Sapriadi Bin Syamsuddin menghubungi saksi KH. Khobir Asy'ari selaku Ulama meminta pendapat tentang video makan krik babi terdakwa yang mana saksi KH. Khobir Asy'ari menjelaskan bahwa konten makan krik babi yang dibuat terdakwa merupakan bentuk menyimpelakan agama Allah dengan cara mengungkap video tersebut pada media sosial sehingga bagi orang lain yang tidak memiliki kelemanan akan menganggap orang dan dalam kehidupan bermegara pun hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap sial yang pertama selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, saksi Syarif Hidayat melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia,
Merdeka, bahwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan hukum
Majelis Ulama Indonesia Nomor : 03/MUI-SS/IV/2023 tanggal 12 April 2023,
yang dijelaskan pula oleh sahabat Dr. Nurcholis, M.Ag sebagai Anggota Komisi
Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan dalam video makar kiti batil
dilawat menyebut kata 'Bismillah' diiringkan dengan barang yang haram, itu
masuk dalam kategori merendahkan, merendah dan merendahkan agama Islam.

masuk dalam kategori diunduh, mengingat dan mensosialis agama Islam; Menimbang, bahwa video makan kuek babi terdakwa dilihat oleh 4,5 juta penonton dan sebagian besar Indonesia ramai setelah viral video tersebut di tonton oleh orang Melayu, Sumatrane dan negara Jawa.

o sertori celi orang Malaysia, Singapore dan negara lainnya.
Menurutnya, bahwa video Terdakwa tersebut mendapat reaksi komentar dari warganet ada yang pro dan ada juga yang konta dengan beragam komentar saling gaduh, saling serang diantara warganet yang Pro dan Konta berakibat menimbulkan rasa kebencian dan rasa permasukan (khalangan) warganet yang resah dan tidak suka dengan video makan kruk babi yang diposting oleh terdakwa behkan ada sebagian warganet menginginkan terdakwa jika tidak pantas terdakwa yang jelas beragama Islam dan seorang muslimah memposting dirinya makan kruk babi yang diharuskan dalam agama Islam namun komentar dan nashiz dari warganet di video makan kruk babi ditanggapi dengan kasih oleh terdakwa yang merasa tidak salah karena telah memposting video terdakwa makan kruk babi disiaran langsung pada akun tiktok @likukerji alamat link <https://www.tiktok.com/@likukerji/video/7208429147918488610> sehingga membuat warganet semakin gerah dan nyamuk terhadap sikap terdakwa tersebut, hanya demi konten mengontenkan agamanya dan perbuatan terdakwa dapat diambil, oleh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak generasi muda Islam yang jika ingin terkenal cukup melakukan perbuatan yang dilarang ngajam agar video jadi viral di dunia maya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut datas kiranya perbuatan Terdakwa dalam pembuatan konten makan bali link dengan mengucap lafadz bismillah, keluar dari nafuk iman, yang kemudian memposting video terdakwa makan kue bali disisanya langsung pada akun tiktok @sumukerj alamat link <https://www.tiktok.com/@sumukerj/video/72084214718488810>, maka perbuatan Terdakwa ini telah memposisikan dirinya dengan jelas terhadap perontonan konten Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa seseorang yang bersama Islam sedang mempertontonkan kepada umum ianya melakukan pertautan yang diilhami oleh agama islam.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tercakwa bahwa Terdakwa sebelumnya telah membuat konten video memakan makanan ekstrem kemudian timbul nilai Terdakwa pembuatan konten video makan babi ituuk karena Terdakwa pernah makan babi sebelumnya. Dalam hal ini pertusas yang dilakukan oleh Tercakwa telah melanggar hak orang lain dalam beragama dimana umat muslim atau orang beragama Islam di Indonesia diakui dan dijamin kebebasan memeluk agama Islam yang dilyakunya. Dalam hal ini Terdakwa benar telah menyebarkan informasi dengan isi konten video menyerang pemeluk agama Islam sehingga membulatkan rasa permusuhan individu dan masyarakat yang mengakibatkan kegaduhan tidak saja ditutupi mawa namun juga didama mawa.

Menimbang, bahwa diperlukan telah didengar 3 (tiga) orang Ahli yang memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 Pustaka Nopiar 7/2023/Pn/Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat sehingga mempermudah kegaduhan, kebencian dan nemau peristiwa terhadap agama yang dalam hal ini adalah agama Islam. Karena dalam video itu juga mencampurkan antara akidah dan konten, karena istilah "bismillah" yang diucapkan tersebut, tidak bisa menghalau yang hambar karena dalam alasan islam batil harus untuk dimakar.

- Bahasa Ahli Assoc. Prof. Dr. Andika Dharma Bachati, S.Pd., S.H., M.Hum tetap melaksanakan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti berupa DVD-R kompatibel d 7 GB Merk Verity dan Iphone 14 Pro

datang buat sedi perlu DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex dan blueray 14 Max. Warna Purple. (Urung) dilakukan dengan cara buat file dari DVD-R Merk Vertex kapasitas 4.7 GB, pemilik akun nama SYARIF HIDAYAT Binti SYARISUDIN, dimulakan data-data bermula 2 (dua) buah video files dan 2 (dua) buah images files yang terkait akun Tiktok @lukumukerj. Pemeriksaan lemah pada buah file dari smartphone merk apple model iPhone 14 Pro Max warna ungu IMEI : 3567952077230224, pemilik akun nama LINA LUTFIAWATI Binti LIU Alias LINA MUKERJEE Binti ABDUL MUKHIT, dimulakan 2 (dua) buah video files yang memperlihatkan momen Terdakwa LINA LUTFIAWATI Alias LINA LINA MUKERJEE Binti ABDUL MUKHIT sedang dubut menghadap sebuah meja dan makan kruk baki pada aplikasi Tiktok yang terpasang dengan akun akun nama @lukumukerj dan aplikasi YouTube yang terpasang dengan akun akun nama @lukumukerj. Bahwa akun tiktok dan akun youtube milik terdakwa tersimpan di dalam iPhone milik terdakwa. Bahwa sejaki melakukan pemeriksaan secara Fisical yakni mengambil semua data di iPhone milik terdakwa melanjutnya dilakukan Index file sehubungan nihil makuk buah terdakwa kerumah dilakukan 2 (dua) satah terhadap

Bawha Alih R. Arik Hanawati, S.T., M.T. berpendapat bahwa dari pandangan batin, tular bahwas, sindikan orang dalam video tersebut mengandung dua dimensi. Pertama, tindakan tersebut akan pasti direpson oleh sikap permusuhan dan kebencian oleh pemeluk agama Islam karena kesakraman nama Allah digunakan untuk mengajak insiutusi yang lengkap sebagai dosa besar pencipta agama Islam. Kedua, sindakan tersebut tergolong sebagai titikaw yang merendahkan ajaran agama Islam karena orang dalam video tersebut, secara sader, melakukan tindakan yang lengkap sebagai dosa besar di depan publik dan dengan maksud untuk disibarkan. Bawha Alih mengatakan secara tidak langsung dan secara implisit, ada upaya untuk mengajak orang lain, salah satu tujuan tertarget secara khusus kepada orang Islam, untuk menyantap krisi budi dan memaksimalkan dorongan untuk berislam. Sementara sebaliknya, krisi budi dan

Autodesk 3D- und 2D-CAD-Systeme Version 2000 SP1 für Windows 95/98/2000/ME/XP

Section 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya memiliki kesadaran bahwa priaku dan segala perlakuananya akan menjadi perhatian dan contoh bagi orang lain selain itu terdakwa berusaha untuk membanggakan (ngegong) agar tidaknya tidak disalahkan sebagai sebuah kampanye atau provokasi sehingga mengantarkan hal tersebut hanya sebagai konten nurut balanya secara sederhana dilakukan sebagai tindakan untuk mencari traffic agar mendapat penghasilan atau keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ketiga ahli tersebut Majelis Hakim sependapat bahwa konten video makan batu krikil Terdakwa secara lengkap tersebut telah menyebarkan informasi yang diujukan untuk membangun rasa kebencian atau pemusuhan individu dan kelompok masyarakat beragama Islam bagi orang yang mencari konten video terdakwa tersebut yang berintis kepada dirinya nya;

Menimbang, bahwa dan pendapat ahli-ahli yang memberikan pendapatnya tersebut Majelis Hakim menyimpulkan konten video yang disebarluaskan Terdakwa melalui media sosial tersebut bukanlah Terdakwa dalam keadaan ketidakdiaman atau ketidak berpajuan. Bahwa tindakan Terdakwa faktanya secara sadar dilakukan sebagai tindakan untuk mencari traffic agar mendapat penghasilan atau keuntungan namun nyatanya adanya akibat lain dari perbuatan Terdakwa yang sebenarnya dapat Terdakwa menduga, mengerti dan menginti dengan mulai, bahwa dari konten video makan batu krikil tersebut dapat melukai perasaan orang-orang yang beragama Islam sehingga membangun rasa kebencian atau pemusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan anggarongan (SARA). Dengan demikian menurut Majelis Hakim pendapat Ahli tersebut diambil alih sehingga perbuatan Terdakwa ini sejuga sebagaimana yang diakaduk dalam opzet hitam dan weter yakni dikotimkan dan dinsyaki serta mengeni akibat dari perburutannya itu;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa ciri khasna semisal unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka penuntutan Umum ini terpenuhi, maka Terdakwa haruslah diintisasi telah terbukti secara sifat dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sempurna dan tanpa hak menyebarkan informasi yang diujukan untuk membangun rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama", sebagaimana diamanuas dalam dikanan tunggal;

Menimbang, bahwa nota pembelaan / pleda Pemohon Hukum Terdakwa mengenai pasal dikanan Penuntutan Umum telah dicabut dengan

Halaman 30 dari 39 Putusan Noor :2020/M/25/2020/11/17



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPdana yang baru. Majelis Hakim setelah membaca memerlukan dan menilai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tersebut maka diketahui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut berlaku 3 (tiga) tahun berhingga sejak tanggal diadangangan pada tanggal 2 Januari 2023 maka Undang-undang KUHPdana yang baru tersebut belum berlaku dengan demikian nota pembelaan /peduli Perbaikan Hukum Terdakwa harusnya ditolak. Memiringkan, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dinyatakan berulah bersalah maka selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pemberian maupun penerimaan yang dapat menghinggalkan sitir melawan hukum dan perbuatan Terdakwa diperdebatkan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 (KUHP) atau Indik pidana tersebut Terdakwa hasilah dijatuhi pidana yang sejemu dengan pertumbuhan

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut atas Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka selain pidana pengancaman Terdakwa dituntut pula dengan denda yang bersamaan sebagaimana amar putusan ini, yang apabila tidak dibayar maka

Menemang, bahan perjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukannya merupakan pembalasan atas perusakan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima

Menurutnya, bahwa dalam perkara ini terhadap Tendakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilantasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex karena bukti tersebut didapat dari Iphone terdakwa untuk memudahkan penyidikan, hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

berkes kerapannya, maka dinyatakan telah lejemplar dalam berikut perkara;
Menimbang, bahawa barang bukti berupa 1 (satu) buah simpanan indosar
dengan nomor HP: 085681200801, 1 (satu) buah skun tiktok @lilumkerj1 link
<https://www.tiktok.com/@lilumkerj1> dan 3 (tiga) Unit handphonne Jerry iPhone 14 Pro Max

Survei dilakukan dengan metode wawancara mendalam atau mendalamkan informasi politik melalui tiga kategori utama sebagai berikut: kepuasan politik, kenyamanan politik, dan kesiapan politik. Kesiapan politik merupakan indikator yang paling penting dalam menilai kepuasan politik.

Midterms 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulcherie Binti Abdul Mukit, bahwa barang bukti tersebut adalah nasi yang diperlakukan terdakwa untuk melakukan perbuatananya, maka untuk 1 (satu) buah simcard indosat dengan nomor HP 089691200801 dan 1 (satu) buah akun tiktok @lilumuker1 link <https://www.tiktok.com> dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit smartphone jenis Iphone 14 Pro Max Warna Purple (ungu) barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menarung, bantuk untuk mengalihkan pidana tersebut Terdakwa, maka perlu diperbaangkan menitah dulu keadaan yang memberikan dan yang mengancam Terdakwa;

Koadaan yang memberakan

- Pertubuhan tertakwa memusatkan masyarakat khususnya Umat Islam sehingga memudahkan kegajahan warganet dari dunia maya sampai ke dunia nyata.

Randomizing treatment

- Terdakwa sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui dan mesyuarati perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi-saksi dan media;
 - Terdakwa berjanji jangan dilukut.

Menimbang, bahwa oleh karena Teidaiwa dijatuhkan pidana maka haruslah diberikan pula anugerah membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pada undang-undang ini diperlukan peraturan
Memperbaikinya, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL

1. Meryatakan terdakwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE BINTI ABDUL MUKHTAR bersalah melakukam sindik pidana "Dengan sergaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang diujuk untuk membenarkan atau kebenaran individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama sebagaimana dalam Dokumen Tunggal Perintah Umum.
 2. Mengaduakan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dan ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak ditayangkan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sejumlah dari pidana yang dijatuhkan.

Volume 30, Issue 12, December 2012, 2012, © The Authors. Journal compilation © 2012 Association for Child and Adolescent Mental Health.

Figure 3b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk Vertex;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomer HP 085881200801;
 - 1 (satu) buah akun tiktok @likumuker link <https://www.tiktok.com/@likumuker>;
Ditampas negara untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit handphone jenis iPhone 14 Pro Max Warna Purple (Ungu);
Ditampas untuk negara;
 6. Memberikan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,-
Bima rhu muncul

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Romi Sinatra, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H., Pribadi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Jelmy Syahputri, S.H.M.H., Panitia Penggaris pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Siti Fatimah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang ditangkap Persehatai Hukumnya;

Anna Göttsch, SH, MH

Romi Sinha, S.H., M.A.

卷之三

PRACTICAL SUGGESTIONS

Digitized by srujanika@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Devita Alfiyatus Sa'adah
2. Tempat, tanggal lahir : Pati, 29 Juli 2002
3. Alamat : Desa Kembang Geta'an
RT 07/RW 02 Kec.
Dukuhseti, Kab. Pati
4. Nomor Handphone : 082225836548
5. Email : devitaalfiyatus@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK/RA : RA Nurul Huda Pati lulus tahun 2008
2. SD/MI : MI Madarijul Huda Pati lulus tahun 2014
3. SMP/MTs : MTs Madarijul Huda Pati lulus tahun 2017
4. SMA/MA : MA NU Banat Kudus lulus tahun 2020
5. S1 : UIN Walisongo Semarang

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Main of Basic English Camp and Course Pare
2. Pondok Pesantren Al-Hidayah Pati
3. Pondok Pesantren Tadris Al-Qur'an Al-Mubarok Kudus
4. Asrama Pendidikan Islam Kudus
5. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. MAKESTA PK. IPPNU MA NU Banat Kudus
2. Pengurus PPTQ Al-Mubarok Kudus
3. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang

Pengalaman Magang

1. KUA Pegandon
2. PN Magelang
3. PA Wonosobo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 16 September 2024



Devita Alfiyatus Sa'adah